CATRA

MENGAYOMI DAN MENCERDASKAN

MAJALAH WANTANNAS RI

EDISI XXXIV/2021

Gerakan Vaksinasi Nasional Wantannas RI di Jawa Barat

Memaknai Hari Pahlawan: Sumber Inspirasi Bela Negara

Pentingnya Strategi Keamanan Nasional Bagi Negara Indonesia

SALAM REDAKSI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga majalah Catra edisi XXXIV/2021 dapat hadir di tengah-tengah pembaca. Majalah ini merupakan bentuk penyampaian informasi, pengetahuan maupun wawasan. Sejalan dengan itu, artikel yang disajikan pada penerbitan majalah Catra edisi XXXIV/2021 ini dengan topik utama yaitu Pentingnya Strategi Keamanan Nasional Bagi Negara Indonesia dilengkapi dengan topik menarik lainnya seperti Opini Memaknai Hari Pahlawan Sumber Inspirasi Bela Negara, Pemuda Republikan untuk Ketahanan Nasional Kita, serta Dirgahayu Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-50. Sementara Rubrik Info Kita menghadirkan Strategi Keamanan Nasional Wujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia, Penganugrahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021, Gerakan Vaksinasi Nasional di Jawa Barat, Wantannas Raih Opini WTP Kategori 10 kali Berturut-turut.

Diharapkan agar artikel tersebut dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca. Kami menyadari bahwa penerbitan edisi XXXIV/2021 ini masih banyak kekurangannya, untuk itu kepada seluruh pembaca, kami sangat mengharapkan sumbangan pikiran, saran dan masukan untuk lebih menyempurnakan edisi selanjutnya. Akhirnya kami segenap Tim Redaksi Majalah Catra mengucapkan selamat membaca semoga dapat menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pelindung: Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H.,M.Tr.(Opsla) **Penanggung Jawab**: Kepala Biro Persidangan Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal Brigjen TNI I Gusti Putu Wirejana, S.T., M.M.S.I. **Redaktur**: Letkol Arh. Abdul Cholik, S.H.,M.H **Penyunting/Editor**: Desi Fajar Nita, S. Sos., Natalina Pakpahan, S.I.Kom **Desain Grafis**: Riza Savitri, A.Md., Fauziah Nurunnajmi, S.E **Fotografer**: Purwanto, Kiswanto **Redaksi**: Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat – 10110, Telp. 021-3863983 Fax 021-3441683, email: dangmas@wantannas.go.id; dangmaswantannas@gmail.com

DAFTAR ISI

TAJUK UTAMA

4 Pentingnya Strategi Keamanan Nasional Bagi Negara Indonesia

OPINI

10 Memaknai Hari Pahlawan Sumber Inspirasi Belanegara

12 Pemuda Republikan Untuk Ketahanan Nasional Kita

14 Dirgahayu Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-50

INFO KITA

9 Pertemuan Silaturahmi DWP Bahas Pentingnya Hidup Bahagia

18 Strategi Keamanan Nasional Wujudkan Indonesia Sebagi Poros Maritim Dunia

20 Penganugrahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021

22 Gerakan Vaksinasi Nasional di Jawa Barat

25 Wantannas Raih Opini WTP Kategori 10kali Berturut-turut

TAHUKAH ANDA

16 Hubungan Masyarakat di Era *Artificial Intelligence*

26 Beasiswa LPDP : Siap Untuk Kuliah Lagi? Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

KEBIJAKAN PEMERINTAH

30 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

TEKNOLOGI

28 Perlukah Memakai Smartwatch?

RESEP

29 Rica-Rica Ikan Tongkol

TUPAI DAN SEMUT HITAM

Alkisah di sebuah kota kecil ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak dan mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen. Sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan keuntungan yang dia dapat, tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu, muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata, wajah petani tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya untuk mengusir tupai tersebut.

Jadi, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam.

Petani tersebut lalu penasaran, mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal, dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah, banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak di rusak oleh tupai. Lalu petani tersebut, mendekati pohon tersebut dan melihat semut yang berbaris di pohonnya.

Petani tersebut sangat bersyukur, karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan tentang pepatah tentang sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sempurna dalam dunia ini.

Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Tuhan sudah memberikan talenta kepada Anda, gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan pada Anda. Tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

PENTINGNYA STRATEGI KEAMANAN NASIONAL BAGI NEGARA INDONESIA

Oleh: Kolonel Tek. Dr. B.D.O Siagian, M.Si (Han)

Perkembangan lingkungan strategis menyebabkan terjadinya evolusi konsep keamanan di seluruh dunia. Globalisasi yang membawa nilai-nilai demokrasi dan HAM telah membangkitkan kesadaran universal untuk menyelamatkan umat manusia dari ancaman perang antar negara, perang saudara, *ethnic cleansing*, konflik komunal, serta berbagai ancaman fisik maupun non fisik lainnya yang membahayakan hidup dan kehidupan umat manusia. Keselamatan umat manusia kemudian menjadi isu universal yang diperjuangkan oleh negara-negara di semua belahan dunia. Oleh karenanya keamanan tidak lagi hanya berorientasi pada keamanan negara untuk menghadapi ancaman tradisonal yang mengandalkan kekuatan militer semata, akan tetapi juga ditujukan untuk melindungi keamanan dan keselamatan umat manusia dari situasi dan kondisi *insecurity* yang disebabkan oleh faktor-faktor nonmiliter baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Bahkan akhir-akhir ini situasi dan kondisi *insecurity* lebih banyak disebabkan oleh ancaman-ancaman non tradisional akibat ketidakmampuan atau kegagalan negara maupun dunia internasional dalam mengelola aspek-aspek politik, ekonomi, militer, dan lingkungan secara komprehensif.

Ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berasal dari dalam dan luar negara, bahkan aktor-aktor non negara, baik koorporasi dan kelompok-kelompok tertentu saat ini dapat mengancam eksistensi sebuah negara dan kawasan. Di dalam konteks ini, maka banyak negara melaksanakan reformasi di sektor keamanan mereka yang dikenal dengan *Security Sector Reform (SSR).* Sektor keamanan dikelola dalam sistem keamanan nasional yang terintegrasi yang sudah melingkupi banyak hal mulai dari militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan. Perluasan penanganan masalah keamanan ini pula yang menyebabkan banyak negara membuat konsep strategi keamanan nasional/SKN (*National Security Strategy/NSS*). yang berlaku paling tidak selama 1 (satu) periode pemerintahan. Dalam sejarahnya Amerika Serikat yang memulai tradisi atau konsep ini yang diikuti oleh banyak negara karena dirasakan banyak sekali manfaatnya bagi pencapaian tujuan berbangsa bernegara suatu negara, karena tujuan strategi ini adalah melindungi kepentingan nasional suatu negara terutama kepentingan objek vitalnya.

Strategi keamanan nasional ini adalah produk yang dihasilkan oleh Presiden terpilih melalui *National Security Council* (Dewan Keamanan Nasional). Strategi keamanan nasional akan dijadikan pedoman terutama bagi Kementerian dan Lembaga dalam membuat kebijakan dan strategi sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan juga oleh seluruh *stakeholder* termasuk swasta dan masyarakat dalam ikut serta secara bersama-sama mewujudkan tujuan nasionalnya. Bahkan di Amerika Serikat sebagaimana pasal dalam Undang-Undang Keamanan Nasional Amerika Serikat tahun 1947 (*National Security Act 1947*) menyatakan bahwa Presiden harus melaporkan secara komprehensif tentang strategi keamanan nasional setiap tahunnya kepada kongres AS berbarengan dengan penyerahan rencana anggaran tahun fiskal berikutnya (America, 2008). Strategi keamanan nasional pada prinsipnya berisi pokok-pokok upaya mengelola dan memberdayakan kekuatan nasional (*national power*) dalam menjaga dan melindungi kepentingan nasional suatu negara. Oleh karena itu sebelum membuat strategi keamanan nasional maka yang harus dilakukan adalah menentukan apa saja yang menjadi kepentingan nasional suatu negara. Adapun kepentingan suatu negara dapat saja mengalami perubahan yang disesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis.

Di banyak negara strategi keamanan nasional dijadikan acuan bagi kementerian dan lembaga dalam membuat kebijakan dan strategi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sebagaimana disampaikan Dr. Colates akademisi dari Cranfield University (UK) bahwa pembuatan strategi pertahanan suatu negara harus mengacu pada strategi keamanan nasional, kemudian selanjutnya strategi pertahanan dapat diturunkan lagi dengan

Foto : JawaPos.com

membuat strategi militer dan turunannya (Dr Gemma Collantes Celador, 2021). Demikian juga strategi lembaga-lembaga lainnya akan mengacu pada strategi keamanan nasional, seperti strategi keamanan siber, dan strategi dalam mengatasi ancaman lainnya.

Sampai saat ini banyak negara sudah mengeluarkan naskah strategi keamanan nasional misalnya Amerika Serikat, Inggris, Rusia, India, Swedia, Jepang, Malaysia dan lain-lain. NSS ini biasanya berlaku 4 sampai dengan 5 tahun (sesuai dengan masa periode suatu pemerintahan). Dalam masa itu naskah ini dapat direvisi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Keberadaan NSS untuk menjaga agar kebijakan dan strategi yang dibuat oleh masing-masing departemen bisa saling tersinergi dan berada dalam formula kebijakan dan strategi keamanan nasional yang menjadi visi dan misi dari Presiden. Inti dari NSS adalah dalam rangka menjaga dan melindungi apa yang menjadi kepentingan nasional (*national interest*) suatu negara.

Namun sampai saat ini bangsa dan negara Indonesia belum pernah memiliki naskah Strategi Keamanan Nasional (SKN). Untuk kondisi sekarang kebijakan dan strategi (Jakstra) antar Kementerian/Lembaga masih belum tersinergi dengan baik, seperti Kementerian Pertahanan sudah memiliki kebijakan dan strategi (Jakstra) Pertahanan Negara, demikian pula POLRI, BIN, Kementerian Perekonomian dan lain-lain sudah memiliki Jakstra, namun karena Jakstra tersebut belum mengacu pada kesatuan konsep dalam NSS maka Jakstra yang dimiliki tersebut masih bersifat parsial dan bersifat sektoral sehingga terdapat potensi tumpang-tindih kebijakan dan strategi bahkan sangat mungkin terdapat kebijakan dan strategi yang saling menegasikan. Oleh karena itu untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional telah menginisiasi untuk membuat naskah Strategi Keamanan Nasional Indonesia. Konsep naskah ini sudah pada tahap finalisasi dengan meminta masukan dan persetujuan dari pejabat yang mewakili lembaga anggota Dewan Ketahanan Nasional dalam kegiatan pra sidang Wantannas tanggal 30 September tahun 2021. Selanjutnya naskah ini akan diajukan ke Presiden RI.

Latar Belakang Pembuatan Strategi Keamanan Nasional Indonesia

Latar belakang pembuatan naskah ini adalah ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini dan ke depan berasal dari dalam dan luar negeri yang kesemuanya dapat saja menghancurkan eksistensi negara kita. Ancaman itu berbentuk militer, ekonomi, ideologi, narkoba, radikalisme, terorisme, separatisme, pandemi, biologi, bencana alam, siber, korupsi, kejahatan transnasional, ilegal mining, ilegal loging, *human traficking dll.*

lanjutan..

Pelaksanaan Pra Sidang Dewan untuk menyempurnakan naskah rancangan dokumen Strategi Keamanan Nasional (SKN) bersama anggota tetap dan tidak Wantannas, Rabu (30/9/2021)

Foto : Natalina Pakpahan

Untuk saat ini ancaman nyata yang sangat berbahaya bagi kita adalah munculnya bibit-bibit perpecahan berdasarkan identitas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Dengan adanya teknologi internet membuat begitu gampangnya orang-orang yang tidak bertanggungjawab melaksanakan hasutan, provokasi dengan segala bentuk untuk tujuan pribadi atau kelompoknya. Pembiaran terhadap persoalan ini tentunya seperti mengali lubang kubur bagi negara kita.

Ancaman yang juga berbahaya saat ini adalah narkoba yang dapat menghancurkan masa depan generasi muda penerus bangsa kita. Demikian juga perilaku korupsi menjadi ancaman yang berbahaya bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Adapula ancaman yang sudah menampakkan gejala-gejalanya yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu atau kelompok tertentu saja yang berpotensi merugikan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara yang lambat laun dapat mengancam eksistensi negara, seperti perda-perda yang bersifat eksklusif menguntungkan kelompok identitas tertentu atau golongan ekonomi tertentu. Ancaman-ancaman seperti ini suatu saat dapat berkembang dan membuat terbelahnya kondisi sosial masyarakat yang sangat rentan terjadinya konflik horisontal yang pada ujungnya dapat berkembang mengancam eksistensi negara.

Untuk menghadapi ancaman seperti di atas maka negara kita memerlukan konsep yang komprehensif yaitu konsep keamanan nasional yang akan diimplementasikan dalam bentuk strategi keamanan nasional. Keamanan nasional sendiri dalam pengertian pada penjelasan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara berbunyi "*Keamanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman. Keamanan nasional dipandang sebagai suatu konsep multidimensional yang memiliki empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi keamanan manusia, dimensi keamanan dan ketertiban masyarakat, dimensi keamanan dalam negeri, dan dimensi pertahanan".* Artinya dalam konteks Indonesia konsep keamanan juga sudah berevolusi mencakup banyak hal yang tidak hanya domain pertahanan saja, akan tetapi juga sudah mencakup ketertiban masyarakat, ekonomi, manusia, lingkungan dan lain-lain yang kesemuanya bertujuan melindungi kepentingan nasional Indonesia. Sebenarnya sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dan yang pernah ada yang menghendaki adanya strategi keamanan nasional diantaranya pernah tertera dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhaneg tahun 2008) yang berbunyi "*Oleh karenanya, guna menjamin terwujudnya kepentingan nasional diperlukan kebijakan dan strategi nasional yang terpadu, antara* ***kebijakan dan strategi keamanan nasional****...*" Demikian pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Transaksi Elektronika Pada pasal 94 a menyatakan bahwa: *penetapan strategi keamanan siber nasional yang merupakan* ***bagian dari strategi keamanan nasional***.

Konsep Strategi Keamanan Nasional Indonesia

Pakar keamanan nasional Arnold Wolfers mengatakan bahwa ada keterikatan yang sangat erat antara keamanan nasional dengan kepentingan nasional.

Keamanan nasional merupakan tujuan, sementara ukuran keamanan nasional suatu bangsa adalah ketiadaan ancaman terhadap nilai-nilai yang dibutuhkan dan ketiadaan rasa takut akan diserangnya nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai yang dimaksud disini ialah kepentingan nasional (Wolfers, 1962, p. 150). Artinya keamanan nasional suatu bangsa akan baik jika kepentingan nasional bebas dari gangguan atau ancaman. Sarkesian *et. al* menyatakan bahwa Kebijakan keamanan nasional terutama berkaitan dengan perumusan dan penerapan strategi nasional yang melibatkan ancaman atau penggunaan kekuatan untuk menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi kepentingan nasional AS (Sam C. Sarkesian, John Allen Williams, 2008, p. 5).

Sementara itu Kementerian Pertahanan AS dalam Supriyatno menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) tahap dalam pembuatan kebijakan keamanan nasional. Pertama menentukan apa saja yang menjadi kepentingan nasional negara tersebut, kedua ancaman apa saja yang akan mengancam kepentingan tersebut, dan tahap ketiga adalah menentukan aktor dan prioritas dalam menetralisir ancaman tersebut (Supriyatno, 2014, p. 134). Sejalan dengan itu Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa sebelum merumuskan keamanan nasional, maka cenderung harus merumuskan kepentingan nasional (Yudhoyono, 2014). Artinya konsep keamanan nasional akan sangat terkait dengan kepentingan nasional suatu negara. Ditambahkan Yudhoyono bahwa pemahaman tentang keamanan nasional di hampir semua negara dalam hal formulasinya memiliki empat cakupan dalam kepentingan fundamental, yaitu pertama untuk menjaga ideologi dan nilai-nilai dasar (*basic values*), termasuk didalamnya adalah demokrasi; kedua, kepentingan menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah (*military interest*); ketiga, kepentingan untuk memperkuat perekonomian bangsa (*economic interest*); dan keempat, kepentingan untuk ikut membentuk tatanan dunia yang damai, adil dan sejahtera (*international interest*) (Yudhoyono, 2014).

Dengan demikian dalam pembuatan strategi keamanan nasional Indonesia, maka harus diketahui terlebih dahulu apa saja yang menjadi kepentingan nasional Indonesia. Bagi Indonesia, tujuan nasional atau tujuan negara tertuang sebagai amanat konstitusional yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menugaskan negara untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Cita-Cita Nasional dan Tujuan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut secara umum disebut sebagai kepentingan nasional yang abadi dan bersifat esensial dalam merumuskan beragam kebijakan nasional. Hal ini sejalan dengan cakupan kepentingan nasional sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara yaitu " kepentingan nasional adalah tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional". Namun disamping kepentingan nasional yang bersifat abadi dan esensial tersebut, sebagaimana konsep kepentingan nasional dari banyak negara, Indonesia senantiasa memiliki juga kepentingan nasional yang bersifat dinamis di berbagai aspek, baik ideologi, politik, kesejahteraan dan ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan negara yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa. Sebagai kaidah pokok, perwujudan kepentingan nasional harus memperhatikan tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta upaya pencapaian tujuan nasional yang dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara.

Dengan demikian konsep keamanan nasional mutlak mensyaratkan keutuhan ranah militer dan non-militer secara terintegrasi dalam satu ekosistem secara komprehensif. Bahkan pada tataran global, interaksi berbagai sistem dengan dinamika lingkungan strategis telah menghasilkan resultan ancaman yang melintas batas teritorial dan yurisdiksi nasional. Hal ini memaksa segenap pihak yang terkait untuk bekerjasama tidak hanya secara lintas-sektoral namun juga secara trans-nasional guna mewujudkan keamanan nasionalnya.

Dalam realitanya di masyarakat, pihak-pihak terkait dalam pembinaan keamanan nasional dapat dipastikan mencakup pelaku usaha yang amanah dan berwawasan kebangsaan ketika memasuki ranah keamanan ekonomi secara spesifik. Demikian pula keamanan pangan tentu akan memerlukan pelibatan petani yang jujur dan ulet, sebagaimana keamanan teknologi informasi pasti memerlukan ahli-ahli komputer yang

nasionalis serta mampu mengembangkan berbagai perangkat lunak dan keras secara berdikari. Demikianlah menjadi sebuah keniscayaan bahwa keamanan nasional harus diwujudkan sebagai kerja bersama dan kerjasama segenap sektor dan komponen bangsa. Dari perspektif **sosio-humaniora**, keamanan nasional sangat relevan dan terkait erat dengan paradigma pembangunan manusia (*human development*). Sementara dari sisi **sosial ekonomi**, praktis keamanan nasional dapat dipandang sebagai barang publik (*public goods*) yang tidak hanya harus dapat dinikmati, namun juga harus diupayakan bersama. Segenap bangsa, warga negara, dan penduduk Indonesia memiliki peran penting sebagai konsumen sekaligus produsen keamanan nasional. Dari sudut pandang **sosial budaya**, nilai-nilai dasar (*basic values)* dan identitas nasional (*national identity*) suatu bangsa juga merupakan obyek pokok perlindungan keamanan nasional. Alhasil dari segi **sosial politik**, keamanan nasional harus menjadi wujud representasi, partisipasi, dan aspirasi segenap golongan yang ada dalam tubuh Bangsa Indonesia.

Konsep dasar pembuatan strategi ini adalah segala upaya pengelolaan dan pemanfaatan kekuatan nasional (*national power*) dalam rangka menjaga dan melindungi kepentingan nasional negara kita. Konsep ini berisi strategi yang terintegrasi dalam sebuah konsep yang utuh yang akan dijadikan pijakan dan dasar bagi semua *stakeholder* terutama Kementerian dan Lembaga dalam pembuatan kebijakan dan strategi di bidangnya masing masing, sehingga kepentingan nasional kita secara keseluruhan dapat terjaga dengan baik. Strategi ini menetapkan fokus-fokus yang akan dilaksanakan untuk melindungi bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan agar aman dari ancaman yang datang dari dalam dan luar negeri yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk di dalamnya menjamin tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, karena faktor utama yang menentukan amannya negara ini adalah adanya kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat. Kesejahteraan dan keamanan adalah ibarat sebuah koin bersisi dua yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu dalam strategi ini sebagaimana strategi keamanan nasional di negara-negara lain memuat juga strategi keamanan ekonomi dan kesejahteraan secara keseluruhan termasuk dalam perlindungan nilai-nilai dasar kita (*national identity*) yaitu empat konsensus berbangsa bernegara (Pancasila. UUD NRI 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika).

Adapun strategi keamanan nasional yang dibuat ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan kita secara efektif dan bersama-sama mencegah dan menangani ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik secara langsung maupun tidak langsung mengancam kepentingan nasional kita. Strategi ini berdasarkan pada sejumlah tujuan yang dibagi dalam empat pilar tujuan keamanan nasional yang diambil dari kepentingan nasional kita ***pertama*** *Melindungi Segenap Bangsa Dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia,* ***Kedua****, Memajukan Kesejahteraan Umum,* ***ketiga,*** *Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, dan* ***Keempat****, Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi Dan Keadilan Sosial.* Keempat fokus strategi keamanan nasional ini akan dihadapkan dengan perkembangan dinamika lingkungan strategis terkini dan ke depan baik di dalam negeri Indonesia maupun dalam tingkat regional dan internasional. Strategi ini memprioritaskan hal mana yang menjadi kepentingan yang bersifat Survival dan vital yang memerlukan konsentrasi yang tinggi, dan mana kepentingan yang bersifat tidak mutlak atau tidak vital, sehingga penanganan suatu masalah dapat dilakukan dengan skala prioritas secara tepat dan efisien. Strategi ini berdasarkan pada ancaman yang sedang terjadi dan juga perkiraan ancaman yang paling mungkin terjadi dalam beberapa tahun mendatang. Dengan ditetapkannya strategi ini maka Indonesia akan lebih siap untuk mencegah, melawan dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan keamanan yang kita hadapi baik pada saat sekarang maupun pada beberapa tahun ke depan.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa strategi keamanan nasional Indonesia mencakup banyak bidang dengan melibatkan banyak aktor baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah mempunyai tanggung jawab penuh untuk menjalankan strategi ini, namun upaya keamanan menjadi tugas semua pihak termasuk swasta dan masyarakat karena hal ini terkait dengan menjaga dan melindungi kepentingan nasional kita semua. Oleh karena itu diharapkan strategi ini dapat dipahami oleh seluruh *stake holder* baik parlemen, birokrat, swasta dan masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional kita yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.***

Tujuan Nasional :
pertama *Melindungi Segenap Bangsa Dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia,* ***Kedua****, Memajukan Kesejahteraan Umum,* ***ketiga,*** *Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, dan* ***Keempat*** *, Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi Dan Keadilan Sosial*

PERTEMUAN SILATURAHMI DWP BAHAS PENTINGNYA HIDUP BAHAGIA

Oleh : Desi Fajar Nita, S.Sos

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Setjen Wantannas dan Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI (IKKT) Pragati Wira Anggini (PWA) Penghubung 06 Setjen Wantannas mengadakan Pertemuan silaturahmi secara luring dan daring bersama anggota DWP serta Anggota IKKT PWA Penghubung 06 Setjen Wantannas, Rabu (27/10/2021).

Kegiatan silaturahmi ini bertujuan agar seluruh anggota bisa lebih mengenal satu sama lain serta memberikan pembekalan keterampilan untuk menambah wawasan dalam berkarya dan tetap bersemangat di masa pandemi ini. Adapun Acara dihadiri oleh Istri anggota TNI sebanyak 31 orang, Istri anggota Polri 2 orang, Istri anggota PNS 24 orang dan PNS wanita sebanyaik 29 orang.

Penasehat DWP sekaligus Pembina IKKT PWA Penghubung 06 Setjen Wantannas Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, SH, MH, M.Tr Opsla, dalam kesempatannya menyampaikan betapa pentingnya hidup bahagia.

"Hakekat dasar tujuan hidup manusia adalah ingin bahagia. Bahagia di dunia maupun di akhirat. Hakekat itu seyogyanya di dasar oleh keyakinan berKetuhanan Yang Maha Esa. Seluruh bangsa Indonesia harus berKetuhanan Yang Maha Esa karena Ideologi kita (Pancasila) sudah kita sepakati sebagai *the way of life* atau pandangan hidup bangsa kita," ujarnya.

Pancasila, ujarnya lagi, selama puluhan tahun sudah menjadi semangat nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Oleh karenanya, seluruh bangsa Indonesia harus meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa.

Dikatakan pula olehnya, kebahagian bukanlah dilihat dari pangkat, jabatan, harta atau kedudukan. Kebahagian letaknya di hati, dan kebahagian hanya dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka dekatkanlah diri kita sedekat-dekatnya dengan Sang Pencipta,Sang pemilik kebahagiaan. Di sisi lain, Penasehat DWP Setjen Wantannas mengungkapkan, kemajuan teknologi di era Revolusi 4.0 yang berdampak pada kehidupan bukan hanya membawa kebaikan, akan tetapi juga berdampak buruk. *Internet of things* bisa menjadi perusak segala sesuatu. Sebagai contoh, kualitas yang kita berikan kepada keluarga menjadi berkurang karenanya. Kita lebih memprioritaskan *gadget* ketimbang *quality time* bersama keluarga. *Internet of things* juga telah berhasil membuat yang jauh menjadi dekat dan yang dekat jadi menjauh.

Di akhir sambutannya, disampaikan bahwa ada beberapa hal penting yang perlu kita ikuti agar kita dapat bertindak cepat dan tepat dalam mencermati hidup yaitu bagaimana menyikapi dengan baik perubahan pada era revolusi 4.0, era revolusi 5.0, disrupsi, dan *post truth.* Yang tak kalah pentingnya adalah menjalankan apa yang menjadi kunci kesuksesan, yaitu banyak bersyukur, sabar dan ikhlas. Laksdya TNI Harjo Susmoro pun berpesan agar kita sama-sama berjuang untuk Wantannas agar bisa hidup kembali dan bangkit dari pandemi ini.

"Ini harus diperjuangkan karena negara membutuhkan Wantannas dan Wantannas adalah lembaga yang sangat penting untuk negara ini," tegasnya.

Sebagai penutup pertemuan, disajikan keterampilan pembuatan konektor masker oleh Ny. Marlindawati Afrizal, demo masak sehat virtual oleh chef Citra serta pengundian door prize dan ramah tamah.Adapun susunan baru organisasi DWP Setjen Wantannas adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Ny. Tita Harjo Susmoro
2. Wakil Ketua Ny. Diana Karev
3. Sekretaris : Ny. Ary Imam
4. Bendahara : Ny. Marlindawati Afrizal

MEMAKNAI HARI PAHLAWAN *sebagai* SUMBER INSPIRASI BELANEGARA

Oleh : Kolonel Kav Rahman,S.Pd.,M.Sc.

Satu slogan yang seringkali didengungkan ketika memperingati hari Pahlawan yakni "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya, bagaimana menghargai para pahlawan?, tentunya tidak cukup dengan hanya mengenang perjuangan yang dilakukan semasa revolusi kemerdekaan, dimana para pejuang rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan, tetapi justru yang penting adalah bagaimana mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan untuk mecapai kesejahteraan sosial bagi segenap bangsa Indonesia sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD 1945. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk membela negaranya sesuai dengan profesi masing dengan mendarmabaktikan diri untuk mewujudkan tujuan pembangunan Nasional yang dilandasi oleh nilai nilai kepahlawanan.

Makna Hari Pahlawan 10 November 1945.

Ketetapan peringatan Hari Pahlawan sesuai Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional ditandatangani oleh Presiden Ir. Soekarno, merupakan manifestasi dari peristiwa pertempuran di Surabaya pada 10 November 1945 yang melibatkan antara tentara Inggeris dengan pejuang Indonesia. Pertempuran tersebut merupakan upaya dari para pejuang kemerdekaan di Surabaya untuk menunjukkan eksistensi menentang pendudukan tentara AFNEI dan administrasi NICA. Para tentara dan milisi Indonesia yang pro kemerdekaan melawan penjajah yakni tentara Britania Raya dan Belanda yang hendak mengambil alih kota Surabaya. Sebelumnya terjadi peristiwa pertempuran yang menewaskan Brigadir Jenderal Mallaby pada 30 Oktober 1945. Hal itu memicu kondisi antara kedua belah pihak semakin memanas.

Pemerintah Inggris melalui Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh meminta pemuda Indonesia menghentikan perlawanan terhadap tentara AFNEI dan administrasi NICA, dan memberi ancaman akan menggempur Kota Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila Indonesia tak menaati permintaan tersebut. Namun hal itu tidak menyurutkan tekad dan semangat para pejuang untuk terus melakukan perlawanan di bawah kepemimpinan Bung Tomo para pemuda terus menggelorakan semangat pertempuran untuk mencegah tentara Inggris menguasai Surabaya.

Pada tanggal 10 November 1945 berkumpul untuk melakukan penyerangan terhadap tentara Inggris di Surabaya maka terjadilah peristiwa pertempuran Surabaya yang kemudian dijuluki 'neraka' karena menelan banyak kerugian. Sekitar 20.000 rakyat Surabaya

menjadi korban dan diperkirakan 150.000 warga terpaksa keluar dari Kota Surabaya. Disisi lain, tercatat sebanyak 1.600 prajurit Inggris tewas, dinyatakan hilang, dan luka-luka. Peristiwa itu memberi motivasi bagi rakyat untuk tidak menyerah dan terus berjuang hingga membuat Inggris pada akhirnya gagal menguasai Surabaya.

Kigigihan, tekad dan semangat pantang menyerah merupakan kunci kemenangan pemuda Jawa Timur dalam mempertahankan Surabaya, sekalipun dibayar mahal dengan gugurnya para pejuan lebih 20.000 jiwa. Keteladanan semangat semangat juang para pahlawan dibalik Sejarah Hari Pahlawan hendaknya dijadikan motivasi untuk meningkatkan rasa cinta tanah air.

Nilai nilai kepahlawanan sebagai Inspirasi sikap Belanegara dalam mengisi pembangunan Nasional

Nilai-nilai keteladanan dari para pahlawan yang dapat menjadi inspirasi dalam impelentasi belanegara meliputi sifat sifat Ikhlas/Rela Berkorban untuk kehidupan bangsa yang lebih sejahtera, membela keadilan, keberanian dan kesadaran atas Persatuan dalam Kebinekaan. Internalisasi nilai kepahlawanan dalam implementasi nilai nilai dasar bela negara dapat digambarkan sebagai berikut :

Pertama. Kecintaan warga negara terahadap tanah airnya dilandasi dengan keiklasan dan kesediaan untuk berkorban, baik secara fisik/materi maupun pemikiran demi kemajuan bangsa dan negara, Untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih sejahtera, para **pahlawan** rela mengorbankan waktu, tenaga, hingga nyawanya demi kemerdekaan untuk kehidupan bangsa yang lebih sejahtera, Seorang yang mencintai sering diuji dengan kerelaan berkorban. Generasi penerus bangsa ditantang mengorbankan waktu, tenaga, hingga nyawanya untuk kemajuan bangsa. Hal ini bukan berarti bahwa harus gugur seperti para pahlawan. Namun, yang dituntut adalah kerelaan memberikan hal-hal yang berharga untuk kepentingan bangsa bangsa dan negara tanpa mengharapkan suatu imbalan atas jasanya.

Kedua. Kesadaran dalam berbangsa dan bernegara dilandasi oleh keinginan untuk membela keadilan. Dengan meyakini bahwa Ketidakadilan dapat menimbulkan konflik dan perpecahan bahkan dapat menyebabkan orang lain bisa kehilangan hak asasi manusia. para pahlawan tergerak untuk melawan penjajah ketika bangsanya diperlakukan tidak adil. Setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki hak dan kewajiban, dimana dalam penggunaannya harus menmperhatikan keseimbangan, Dalam menggunakan hak ada hak hak warga lain yang harus diperhatiakan.

Ketiga. Yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara didasari oleh kesadaran atas Persatuan dalam Kebinekaan. Indonesia dianugerahi keragaman. Oleh karena itu "Bhinneka Tunggal Ika" digunakan untuk menjadi semboyan bangsa. Indonesia yang dikemas dalam bangunan ideologi, Para pahlawan perintis kemerdekaan mengerti bahwa perbedaan bukanlah hambatan untuk menjadi bangsa yang besar dan kuat akan tetapi justru bisa menjadi kekuatan bila dapat disatukan.

Keempat, Rela berkorban untuk bangsa dan negara didasari oleh keberanian dan keikhlasan. keberanian bukan berarti tanpa rasa takut. membela kebenaran pasti memiliki resiko yang harus dihadapi. Keberanian untuk mengambil resiko untuk satu tujuan dari para pahlawan membuat mereka pantang mundur atau pantang menyerah dengan berbagai tantangan yang dihadapi dari kaum penjajah. Namun mereka akan tetap berpegang teguh pada prinsip tujuan yakni mencapai kemerdekaan.

Kelima, Memiliki kemampuan bela negara baik secara psikis maupun fisik, setiap negara tidak harus mengikuti latihan militer atau menjadi prajurit, akan tetapi dapat mengembangkan dan menggunakan kemampuan sesuai profesi masing-masing untuk berkontibusi dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional yang dilandasi oleh sifat ikhlas, pantang menyerah, rela berkorban, keberanian, keadilan dan kebersamaan sebagai warga negara.

Penutup

Momentum dalam memperingati hari pahlawan hendaknya menjadi renungan bagi setiap warga negara terutama generasi muda untuk terus berintroskpesksi diri berfikir apa yang sudah dikorbankan untuk kemajuan bangsa dan negaranya, dan bukan sebaliknya mempertanyakan apa yang sudah diberikan oleh bangsa terhadapnya.

PEMUDA REPUBLIKAN UNTUK KETAHANAN NASIONAL KITA

Oleh Dr. La Piliha

Memperingati peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, hakekatnya mengenang pergerakan kebangsaan kaum muda yang bervisi brilian dan berpikir *Out of the Box.* Sebab dimasa itu atribut sekterianisme, feodalisme, dan sekat-sekat primodialisme lainnya merupakan corak dasar kehidupan sosial budaya dan politik kerajaan-kerajaan di nusantara (*local wisdom of archipelago*). Tetapi mereka berhasil melakukan proses integrasi nasional yang berlangsung dengan sejuk tampa noice. Kolektivitas berpikir memproduksi cikal bakal lahirnya konsepsi kebangsaan Indonesia, yang selanjutnya berkembang sebagai konsep Negara-Kebangsaan (National State). Memiliki visi kebangsaan yang sangat menginspirasi seluruh rakyat Indonesia, menyeluruh tampa sekat-sekat kedaerahan dan bersifat jangka panjang ("*A Vision is goal that is "massively inspiring, overarching, and long term*". By L. Eisner).

Golongan pemuda yang terhimpun dalam konggres pemuda I dan II (Jong Java, Jong Cilebes, jong Soematranen Bond, Jong Bataks Bond, Jong Islamieten Bond, Jong Poemuda Indonesia, Jong Ambon, dan Jong Pemoeda Kaoem Betawi) adalah kelompok Pemuda Republikan. Sebutan kepada pemuda yang berpikir kebangsaan dan menginginkan lahirnya negara dengan sistem ketatanegaraan republik. Ideologi republikan berhasil menyatukan pemuda dari berbagai lintas etnis untuk menyatukan diri dengan ikrar "satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia" (Sumpah Pemuda, 28 Agustus 1928).

Dalam perjalannya, pemuda republikan aktif melibatkan diri merumuskan dan mengawal usaha-usaha persiapan dan pelaksanaan kemerdekaan RI. Mereka terlibat dalam BPUPKI (*dokuritsu zunbi chosakai*) dan Panitia PPKI (*dokuritsu zunbi inkai*). Mendesain peristiwa Rengasdengklok, yakni suatu gerakan dengan maksud mendorong percepatan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan RI. Alhasil, kausalitas peristiwa yang cukup signifikan mempengaruhi lahirnya peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Tonggak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasca kemerdekaan, pemuda republikan aktif mengawal dan memberikan kritik korektif terhadap jalannya pemerintahan. Pemuda republikan yang berkolaborasi dengan tokoh nasional lainnya berhasil menggulingkan rezim pemerintahan yang dinilai "mangkir" dari amanah Pancasila dan UUD 45.

Wajah Suram Pemuda Kontemporer

Pasca reformasi, geliat gerakan pemuda yang bernafaskan republikan di negeri tercinta sukar ditemukan. Kaum muda pengagas gerakan reformasi yang berkiprah di lembaga eksekutif dan legislatif, sebagian terlibat dalam kasus korupsi atau praktek mall administrasi dalam proses penyelenggaraan negara.

Produk kebijakan negara yang mereka formulasikan atau setujui terkadang atas dasar preferensi politik sesat, pesanan kapitalis, atau pesanan golongan kepentingan lainnya. Tentu hasil dan dampaknya Ketahanan Nasional kita. Padahal agenda pemberantasan korupsi merupakan poin utama gerakan reformasi yang disuarakan oleh pemuda dan mahasiswa.

Seiring kemajuan peradaban dunia (industry 4.0/society 5.0), kaum muda kurang memiliki daya tangkal (self durability) untuk mencegah pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kaum muda kelompok yang paling rentan dari efek penetrasi ideology dan budaya asing. Infiltrasi budaya asing yang berdampak negatif, yang ditengarai sebagai bagian dari agenda perang peradaban (*the war of civilization*) adalah ancaman kebangsaan yang sesungguhnya, sebab pemuda kita adalah pemegang estafet kepemimpin bangsa. Wajah pemuda berwatak hedonis, individualis, intoleransi, fanatis sempit, kapitalis, dan sosialis, tentu sangat tak layak memegang estafet kepemimpinan nasional.

Keberlangsungan hidup negara atau bubarnya Negara Kesatuan RI, bertumpu pada kesiapan atau ketahanan Pemuda kita (*resilience of our young*) dalam mempersiapkan diri sebagai generasi terbaik dan pemimpin nasional kedepan. Kita semua tentu tidak menginginkan praha kebangsaan, misalnya *missing link of the leadership of Indonesian state*.

Gagasan Pemuda untuk Ketahanan Nasional

Peringatan hari Sumpah Pemuda ke-93 hakekatnya memberikan spirit kepada pemuda republikan untuk menyelenggarakan konfrensi Pemuda Nasional yang tujuannya melahirkan rumusan dan gagasan solusi alternatif peningkatan kualitas ketahanan nasional kita. Dewan Ketahanan Nasional dalam berbagai kesempatan menjelaskan kepada publik perihal berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mengancam kelangsungan bangsa baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri.

Dalam pendekatannya, pemuda diharapkan menawarkan *concepts of strategic management* ketahanan nasional, seperti yang yang dikemukakan oleh Thomas L. Wheelen sebagai berikut:

Pertama, Pemuda melakukan penjajakan dan pengamatan (*environmental scaning: gathering Information*) terhadap berbagai AGHT baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Lingkungan yang dimaksud adalah struktur dan budaya birokrasi pemerintahan nasional dan daerah (*chain of command*) yang menghambat implementasi kebijakan ketahanan nasional, karakter dan budaya masyarakat Indonesia yang mendukung dan melemahkan ketahanan nasional (*belief, expectation, and values*), efektivitas dan evisiensi pengelolaan sumber daya negara yang tersedia guna mendukung ketahanan nasional (*assets, skill, competencies, knowledge*), serta pengaruh kekuatan regional dan internasional yang dapat memberikan peluang untuk mendukung ketahanan nasional dan ancaman global terhadap ketahanan nasional kita. Kaum muda perlu merumuskan bagaimana mengelola kelemahan negara sebagai kekuatan strategis ketahanan nasional dan mengelola tantangan internasional sebagai peluang strategis dalam meningkatkan kualitas Ketahanan Nasional (SWOT Analysis).

Kedua, Kaum muda perlu menawarkan formulasi kebijakan alternative strategis dalam meningkatkan kualitas ketahanan nasional. Berupa rancangan visi dan misi kebijakan (*reason for existensi*), tujuan program kebijakan ketahanan nasional (*whats results to accomplish when*), strategi pencapaian tujuan (*plan to achieve the mission and objectives*), serta rancangan kebijakan sebagai petunjuk pengambilan keputusan oleh penyelenggara ketahanan nasional di pusat dan daerah (*board guidelines for decision making*).

Ketiga, merumuskan strategi implementasi kebijakan nasional kita kepada pemerintah (*implementation strategy: putting strategy into action*), berupa program kegiatan (*activities needed to accomplish a plan*), rancangan anggaran untuk mendukung terlaksananya kebijakan nasional (*budgets: cost of the programme*), dan prosedur kerja kebijakan ketahanan nasional di pusat dan daerah (*secuence of steps needed to do the job*).

Keempat, merumuskan formulasi sistem evaluasi dan kontrol untuk memastikan implementasi kebijakan ketahanan nasional telah sesuai dengan rencana awal. Sekaligus menyiapkan instrument untuk mengukur indeks ketahanan nasional (*evaluation and control: monitoring performance*). Sistem kontrol dan evaluasi dilakukan sejak merumuskan strategi formulasi kebijakan sampai dengan proses implementasi kebijakan ketahanan nasional.

Publik Indonesia tentu mengharapkan hadirnya kaum muda republikan yang selalu berpikir kolektif untuk kemajuan bangsa. Bukan saja melakukan kritik dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah, tetapi selalu menawarkan strategi formulasi, implementasi, dan sistem kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan nasional, utamanya dalam upaya peningkatan kualitas ketahanan nasional. Bravo Pemuda***

Dirgahayu Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-50

Oleh : Muhammad Iqbal Rafani

Bagi segenap lapisan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah bermetamorfosis menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) begitu melekat sebagai wadah organisasi untuk menghimpun seluruh pegawai negeri di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, bila masyarakat awam melihat orang-orang mengenakan seragam pakaian batik warna biru dengan logo Kalpataru atau pohon kehidupan (*wisdom tree*), mereka akan mendeskripsikan bahwa itu adalah anggota KORPRI. Dengan kata lain, atribut KORPRI sudah begitu melegenda di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Tahukah anda, siapa yang merancang logo KORPRI tersebut? Dia adalah Aming Prayitno, seorang seniman asal Surakarta yang pernah belajar seni di *Koninklijk Akademie voor Schonkunsten*, Gent, Belgia. Hasil rancangannya mendapatkan sertifikat penghargaan dari pemerintah pada tahun 1973. Unsur KORPRI dilambangkan dengan pohon Kalpataru yang merupakan pohon pelindung dan penyeimbang alam. Dalam pohon tersebut terdapat 17 ranting, 8 cabang, dan 45 daun melambangkan hari Kemerdekaan Indonesia yang menaungi sebuah siluet rumah dengan lima tiang sebagai interpretasi dasar negara Pancasila. Di bawahnya terdapat sayap yang menyiratkan kebebasan. Logo KORPRI dengan warna kuning emas merupakan refleksi dari kemuliaan.

Sejarah KORPRI

Keberadaan pegawai negeri Indonesia sebetulnya sudah melewati era yang cukup panjang, yaitu sejak masa kolonialisme, kemerdekaan, orde baru, hingga reformasi. Namun, secara formal KORPRI berdiri pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia. Dengan demikian, saat ini KORPRI sudah menginjak usia setengah abad. Pada tanggal 29 November 2021 ini, KORPRI merayakan hari jadinya yang ke-50.

Era Kolonialisme

Pada masa penjajahan kolonial Belanda, banyak pegawai pemerintah Hindia Belanda yang berasal dari kaum bumi putera. Kedudukan pegawai merupakan kelas bawah, berdasarkan rekruitmen kebutuhan kolonial semata. Pada saat beralihnya kekuasaan Belanda kepada Jepang, secara otomatis seluruh pegawai pemerintah eks Hindia Belanda dipekerjakan oleh pemerintah Jepang sebagai pegawai pemerintah.

Era Kemerdekaan

Seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, seluruh pegawai pemerintah dijadikan pegawai NKRI. Akan tetapi menjelang penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, pegawai negeri terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu: (1) Pegawai yang bernaung di wilayah kekuasaan Indonesia; (2) Pegawai yang berada di daerah yang diduduki Belanda (nonkolaborator); dan (3) Pegawai yang Bersedia bekerjasama dengan Belanda (kolaborator). Era ini dikenal dengan Republik Indonesia Serikat (RIS).

Setelah penyerahan kedaulatan, seluruh pegawai dari ketiga kelompok di atas dijadikan pegawai RIS. Era ini dikenal dengan sistem parlementer yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet pemerintahan yang berbasis multi partai. Para politisi memegang kendali pemerintahan dengan memimpin berbagai departemen yang sekaligus menyeleksi pegawai negeri berdasarkan dominasi partai politik. Pelayanan publik menjadi tidak optimal, karena pegawai negeri yang seharusnya berfungsi melayani masyarakat dan negara menjadi terkotak-kotak sebagai alat politik partai. Afiliasi para pegawai negeri sangat kental diwarnai dari partai mana mereka berasal. Kondisi ini terus berlangsung hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.

Setelah Dekrit Presiden yang ditandai dengan sistem ketatanegaraan kembali ke sistem Presidensiil berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, keberadaan pegawai negeri berada di bawah komando Demokrasi Terpimpin yang diwarnai oleh kebijakan Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Pada era tersebut sebetulnya muncul berbagai wacana agar pegawai negeri bersikap netral dari partai politik. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian ditetapkan bahwa bagi suatu golongan pegawai negeri dan/atau sesuatu jabatan, yang karena sifat dan tugasnya memerlukan, dapat diadakan larangan masuk suatu organisasi politik. Ketentuan tersebut diharapkan akan diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengaturnya lebih lanjut. Akan tetapi, PP yang diharapkan ternyata tidak kunjung tebit. Sistem pemerintahan era ini berakhir dengan meletusnya upaya kudeta oleh Partai Komunis Indonesia dengan Gerakan 30 September (G-30S PKI) pada tahun 1965. Beberapa pegawai negeri ada yang terjebak dalam mendukung mendukung PKI.

Era Orde Baru

Pada awal era Orde Baru, dilaksanakan penataan kembali pegawai negeri dengan terbitnya Keppres RI Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 dalam Keppres tersebut, KORPRI merupakan satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai negeri di luar kedinasan. Tujuan pembentukannya adalah agar pegawai negeri ikut memelihara dan memantapkan stabilitas politik dan sosial yang dinamis dalam NKRI.

Pada era ini KORPRI kembali menjadi alat politik. Undang-Undang Nomor 3 Tahun1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Poltik, makin memperkokoh fungsi KORPRI dalam memperkuat barisan politik. Bahkan dalam setiap Musyawarah Nasional KORPRI, diputuskan bahwa organisasi ini harus menyalurkan aspirasi politiknya secara monoloyalitas ke Golongan Karya.

Era Reformasi

Memasuki Era reformasi, muncul keberanian mempertanyakan konsep monoloyalitas KORPRI, sehinga sempat terjadi perdebatan tentang kiprah pegawai negeri dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Beberapa pihak ada yang beropini bahwa KORPRI dibubarkan saja. Jika pegawai negeri ingin berkiprah di kancah politik, maka sebaiknya membentuk partai sendiri. Akhirnya, dihasilkan konsep yang disepakati bersama bahwa KORPRI harus netral secara politik.

Melalui PP Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik, pada Pasal 7 Ayat 1 diatur bahwa setiap PNS yang jadi anggota partai poltik harus melepaskan keanggotaan dan/atau kepengurusannya dari KORPRI. Dengan adanya ketentuan tersebut menjadikan anggota KORPRI tidak dimungkinkan untuk ikut dalam kancah partai politik apapun. KORPRI hanya bertekad berjuang untuk menyukseskan tugas negara, terutama dalam melaksanakan pengabdian bagi masyarakat dan bangsa.

Setelah melalui liku-liku perjalanan yang relatif cukup panjang, KORPRI seyogianya berpegang pada semboyan "*Djangan Sekali-kali Meninggalkan Sedjarah* (*Djas Merah*)" sebagaimana pernah diucapkan oleh Bung Karno melalui pidato peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke- 21 pada tanggal 17 Agustus 1966.

Sejatinya, KORPRI harus berorientasi pada tugas dan pelayanan serta selalu senantiasa berpegang teguh pada profesionalisme melalui Panca Prasetya KORPRI bagi segenap insan ASN yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. ***Pertama***, setia dan taat kepada NKRI berdasarkan Pancasia dan UUD 1945. ***Kedua***, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. ***Ketiga***, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. ***Keempat***, bertekad terus memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan KORPRI. ***Kelima***, berjuang dengan jujur menegakkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan profesionalisme.

Dirgahayu KORPRI ke-50…!!! Setengah abad usiamu, gelorakan semangat juang dan kiprahmu dalam mendukung kejayaan Indonesia di masa kini dan masa-masa mendatang yang penuh cobaan dan tantangan. Jangan biarkan kepak sayapmu yang menyiratkan kebebasan lunglai terbelenggu oleh absolutisme hegemoni kekuasaan dan arogansi kelembagaan yang tiada bertepi.

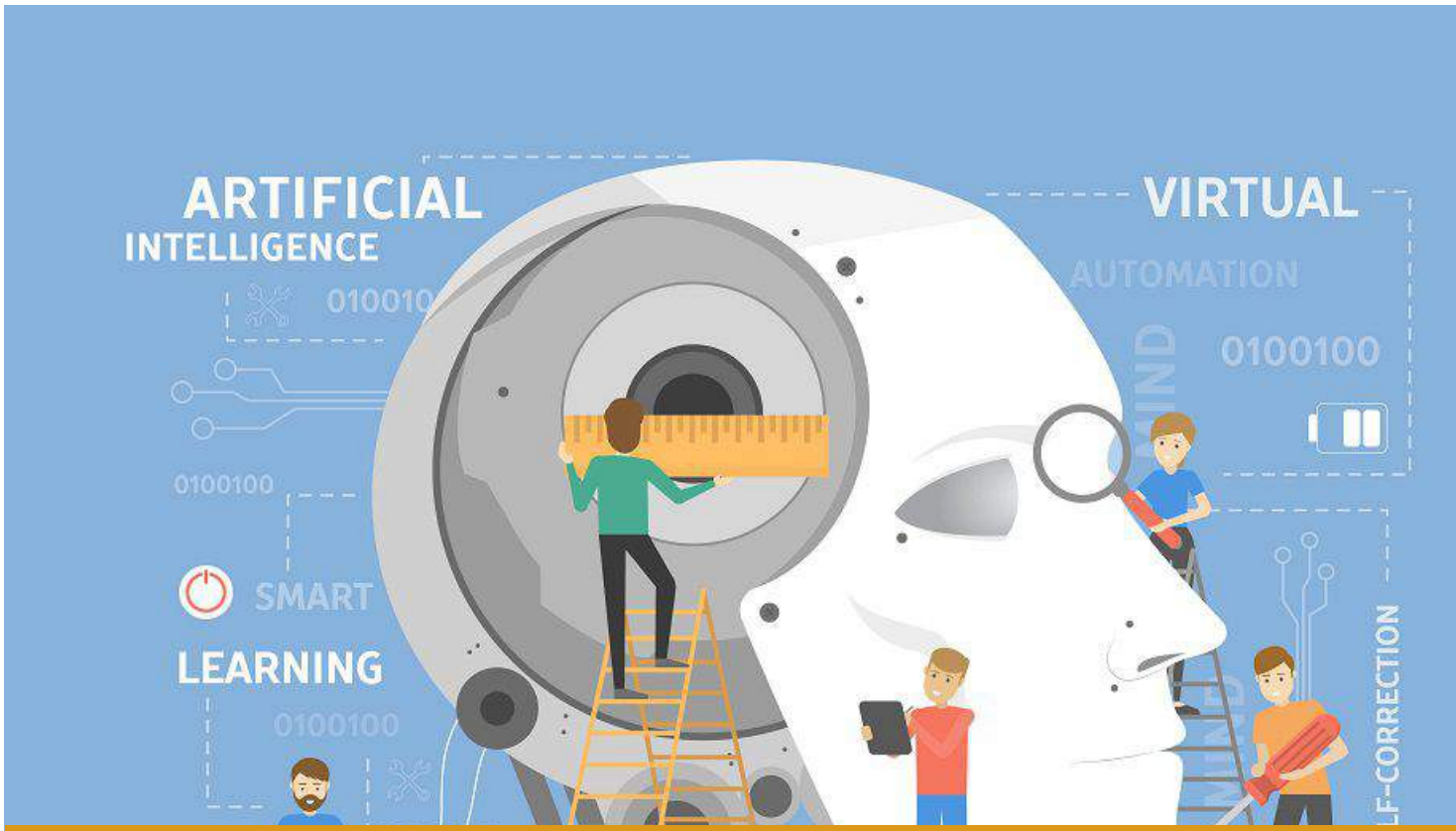

HUBUNGAN MASYARAKAT DI ERA *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*

Oleh: Nadia Talita Putri, S.IP

Hubungan masyarakat atau yang biasa dikenal sebagai Humas, merupakan sebuah proses strategi komunikasi untuk menciptakan hubungan simbiosis mutualisme antara institusi dan publik, dengan mengelola reputasi dan citra institusi itu sendiri agar tetap baik sehingga menciptakan *public trust*. Humas menjadi bagian penting yang perlu dimiliki oleh sebuah institusi, tidak hanya Swasta, namun juga Pemerintahan. Hal ini dikarenakan Humas selain menjadi jembatan penghubung dengan publik dan *stakeholder* terkait, Humas juga memiliki tugas untuk memberikan tanggapan dan respon untuk menjaga hubungan tetap harmonis.

Perkembangan teknologi dan informasi mengharuskan Humas untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada, begitu pula dengan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dewasa ini. Berdasarkan Iprahumas Indonesia (2021) *Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan merupakan ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas yang melibatkan mekanisme untuk menjalankan suatu tugas dengan menggunakan komputer. Dengan kata sederhananya, AI ini adalah sebuah teknologi yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program dan robot untuk "berpikir" secara cerdas layaknya manusia yang dibuat melalui algoritma pemograman yang kompleks. Sedangkan konseptualisasi AI dalam konteks humas adalah sebagai sebuah teknologi yang menunjukan kemampuan kognitif *humanoid* (membantu manusia dalam menyelesaikan tugas) dan menjalankan fungsi *humanoid* dalam melaksanakan aktivitas humas, baik secara mandiri maupun bersama dengan praktisi humas.

Sebelum membahas lebih jauh terkait kompetensi dasar dan perangkat humas yang mendukung pekerjaan di era AI, seyogianya kita ketahui terlebih dahulu transformasi humas dari masa ke masa. Menurut Arief dan Saputra (2019) transformasi humas terdiri dari lima fase, yakni:

1. Humas pada Era 1.0. Era ini dikenal sebagai humas tradisional, pada era ini humas diharuskan untuk melaksanakan *monitoring* secara manual setiap harinya, di mana media cetak seperti koran dan majalah, hingga televisi menjadi andalan dan sumber informasi.
2. Humas pada Era 2.0. Era ini ditandai dengan

kelahiran media daring, seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Era ini menggambarkan komunikasi yang horizontal, saling berhubungan, serta komunikasi dari banyak sumber ke banyak audiens atau *many to many*, sehingga peran humas pada era ini adalah sebagai *connector*.

3. Humas pada Era 3.0. Media sosial mulai bermunculan di era ini dan menjadi media paling banyak digunakan, paling disukai, serta sebagian besar dipercaya oleh publik.
4. Humas pada Revolusi Industri 4.0 adalah era di mana mesin mulai terintegrasi dengan jaringan internet yang membidangi lahirnya *Artificial Intelligence, Big Data Cyber-physical systems, the Internet of Things* (IoT), dan *the Internet of Service* (IoS).
5. Humas pada *Society* 5.0 merupakan era gabungan teknologi level tinggi antara *Big Data*, IoT dan AI yang menghasilkan *Human Settle Technology Best Concept.*

Iprahumas Indonesia mengungkapkan bahwa pada era *Artificial Intelligence* ini, Humas perlu memiliki beberapa kompetensi dasar. Salah satunya kompetensi analisis data yang menitikberatkan kepada kemampuan untuk menganalisis data dengan menggunakan berbagai metode, dapat menerapkan teknik analisis, mampu mengevaluasi dan membuat laporan untuk masukan pengambilan keputusan, serta mampu mengelola *trust* dan reputasi. Terdapat 3 (tiga) kategori dalam kompetensi dasar analisis data yang perlu dimiliki oleh humas yaitu, pertama analisis deskriptif, di mana humas dituntut untuk mampu menganalisa kejadian yang sudah berlalu, ketika rilis telah dikirimkan kepada media, humas memiliki tugas untuk memastikan rilis yang dikirimkan memiliki jangkauan yang baik. Kedua, analisis prediktif, humas dapat menganalisa data statistik terhadap kemungkinan yang akan terjadi, berdasarkan penglihatan dari informasi yang diawasi pada *dashboard.* Terakhir, analisis preskriptif, di mana analisa yang dihasilkan berdasarkan hasil pencarian informasi yang dapat memunculkan rekomendasi-rekomendasi yang perlu dilakukan oleh pihak manajemen.

Tidak hanya memiliki kompetensi dasar analisis data, Humas juga dituntut untuk memiliki kompetensi dasar dalam mengelola media sosial dengan strategi yang lebih terintegrasi dengan komunikasi dua arah seperti memberikan *like* dan *comment* pada konten yang telah di unggah oleh *followers,* serta merencanakan konten yang dikelola melalui media sosial. Selain itu, humas juga harus mampu menjadi *influencer* dengan memahami pengukuran media sosial untuk menentukan nilai program *marketing influencer* baik yang berbayar ataupun tidak berbayar oleh pihak ketiga yang dapat membentuk sikap audiens. Humas juga bahkan dituntut mampu membuat *content creator* baik berupa tulisan, gambar, video, *voice* atau gabungan dari kedua atau semua konten. Kompetensi ini mendorong humas untuk mampu memanfaatkan berbagai platform media dengan konten yang disukai dan diminati oleh audiens.

Adapun perangkat humas yang mendukung pekerjaan di era *Artificial Intelligence* adalah (1) Level I: *Simplification of task* yakni kemampuan untuk menyederhanakan tugas-tugas, membantu simplifikasi berbagai tugas rutin humas, (2) Level II: *Social listening* atau kemampuan mendengarkan, perangkat ini berfungsi untuk mengidentifikasi pendapat dan persepsi audiens terhadap produk serta layanan, (3) Level III: *Automation of task* adalah kemampuan untuk otomatis berbagi tugas dan pekerjaan humas. Perangkat ini merupakan perangkat untuk mengelola dan mengotomatisasi konten-konten pada media sosial, (4) Level IV: *Artificial Intelligence for structured data* yaitu teknologi *Artificial Intelligence* yang memiliki kemampuan *Artificial Intelligence* untuk data yang terstruktur, dan (5) Level V: *Artificial Intelligence for unstructured data* yaitu teknologi *Artificial Intelligence* yang memiliki kemampuan untuk mengelola informasi berdasarkan jenis atau variasi data yang tidak terstruktur. Perangkat ini merupakan inti dari karakterisasi perangkat humas.

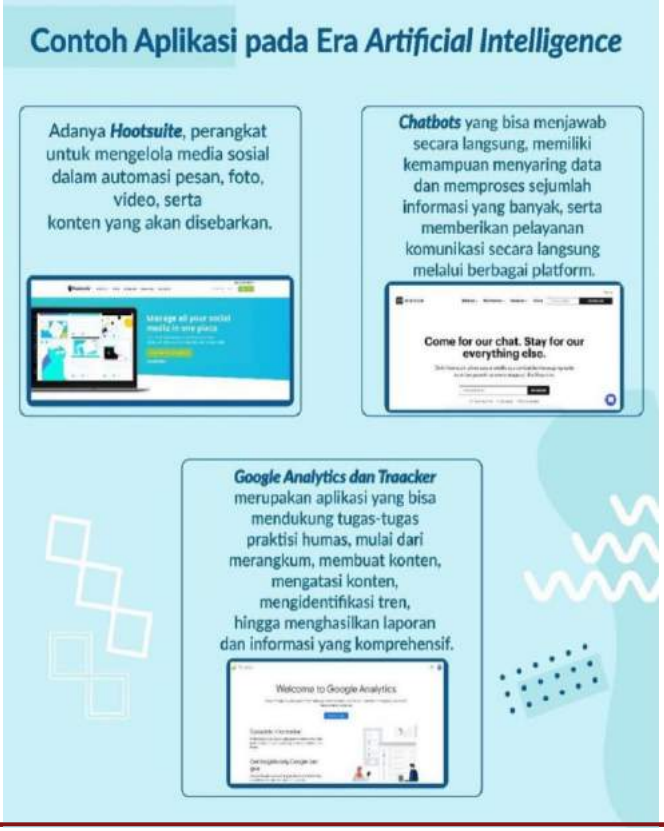

Strategi Keamanan Nasional Wujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

Oleh : Natalina Pakpahan, S.I.Kom.

Kepemimpinan Presiden Jokowi memiliki Visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Poros Maritim Dunia. Visi ini, disampaikan dalam pidato di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 *East Asia Summit* (EAS) di Nay Pyi Taw, Myanmar (13/11/2015).

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S. Sos., S.H., M.H., M.Tr. (Opsla), membahas Sistem Keamanan Nasional dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat maritim dunia saat menjadi pembicara pada kuliah umum Studium Generale (SG) ITB KU-4078, pada Rabu (08/09/2021). Kegiatan SG yang berlangsung secara virtual ini dihadiri oleh 650 peserta *platform Zoom* dan 100 orang pada *platform YouTube*.

Sesjen Wantannas Laksdya Harjo Susmoro menyampaikan keprihatinannya kenyataan Indonesia yang sebenarnya dikenal sebagai negara kaya akan sumber daya alam, tidak hanya dari daratan, tetapi juga lautan. Namun, sayangnya permasalahan di negeri ini tak kunjung reda. Maka dari itu, diperlukan strategi keamanan nasional untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Menurut sejarah, lanjutnya, kerajaan maritim Indonesia memberi pengaruh yang signifikan sampai seluruh Asia, Madagascar, dan Afrika. Kerajaan Sriwijaya pernah mengendalikan Selat Malaka yang menjadi pusat perdagangan internasional. Di sisi lain, Kerajaan Majapahit pernah menggunakan kekuatan laut untuk melakukan proyeksi kekuasaan. Hal ini menunjukkan kekuatan maritim Indonesia pada masa itu.

Namun, sejak Belanda menjajah Nusantara, bukan hanya kekayaan alam yang dirampas, tetapi juga jiwa, semangat, dan karakter masyarakyat Indonesia, yang sebagian besar adalah masyarakat bahari, diubah menjadi masyarakat agraris. Karena itu, Indonesia kini juga dikenal sebagai negara agraris.

"Bung Karno pernah mengingatkan bahwa Indonesia tidak bisa menjadi bangsa yang kuat apabila tidak bisa menguasai samudra—paling tidak samudra kita sendiri—dan tidak kembali menjadi bangsa maritime," katanya.

Laksdya TNI Harjo Susmoro menyampaikan bahwa terdapat lima pilar yang harus diwujudkan untuk mencapai visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu (1) membangun kembali budaya maritim, (2) menjaga dan mengelola sumber daya laut, (3) memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, (4) diplomasi maritim, dan (5) membangun kekuatan maritim.

Meski demikian, ada ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang harus dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Menurutnya, salah satu ancaman krusial yang harus dihadapi adalah ancaman disintegrasi bangsa. Ini jugalah yang

menyebabkan Indonesia terjajah selama berabad-abad oleh Belanda (berhasilnya *politik devide et impera*).

Ia melanjutkan bahwa ancaman ini terjadi karena bangsa Indonesia yang semakin menjauh dari nilai-nilai luhur Pancasila. Dari masalah ini, dapat timbul konflik-konflik lainnya, seperti konflik intoleransi, radikalisme, terorisme, narkoba, dan lain lain. Untuk itu, diperlukan stabilitas keamanan nasional yang tinggi untuk mewujudkan kepentingan nasional.

Pada era Perang Dunia II, keamanan nasional lebih difokuskan pada pertahanan militer. Namun, seiring berjalannya waktu, kemanan nasional berkembang menjadi beberapa dimensi. Selain militer, terdapat juga keamanan penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dalam negeri, dan keamanan manusia sebagai individu yang hidup dalam masyarakat.

Laksdya Harjo Susmoro mengatakan bahwa Strategi Keamanan Nasional terdiri dari tiga komponen, yaitu tujuan, sarana, dan cara. Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea IV cita-cita dan tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kemudian, Indonesia dapat menggunakan kekuatan maritimnya sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Lebih jauh, dengan mengutip Presiden Jokowi, ia berpendapat bahwa cara yang paling utama untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah peningkatan wawasan kebangsaan.

Salah satu perwujudan peningkatan wawasan kebangsaan adalah dengan bela negara. Dalam lingkup universitas, terdapat Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi hakikat terselenggaranya bela negara. Tri Dharma ini berisi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian pada masyarakat. Hal ini dilakukan agar tercipta manusia-manusia muda yang dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih maju.

"Mahasiswa hendaknya dapat menerapkan ilmunya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mahasiswa hendaknya mengetahui bagian tugasnya masing-masing dalam mengabdi pada negara," tutupnya.

PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI menghadiri secara virtual Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, Selasa (26/10/2021). Kegiatan yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya yang bertujuan untuk melihat dan menilai sejauh mana kepatuhan Badan Publik (Kementerian/Lembaga) terhadap implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Wapres RI dalam sambutannya melalui zoom mengatakan, ia sangat mengapresiasi KIP atas terselenggaranya acara ini.

"Saya menyambut baik dan mengapresiasi KIP yang telah menyelenggarakan acara ini, yang sekaligus menunjukan peran penting KIP dalam mengawasi dan mengevalusi capaian keterbukaan informasi Badan Publik, serta mengawal penguatan akuntabilitas Badan Publik," ujar Wapres.

Lebih dalam lagi Wapres menegaskan, acara penganugerahan ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi Badan Publik untuk terus mengakselerasi upaya – upaya terbaik mengenai keterbukaan informasi melalui inovasi yang tiada henti. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publk dilakukan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat guna terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan transparan. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi juga diharapkan sebagai sarana introspeksi bagi seluruh Badan Publik untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan publik dan produktivitasnya walaupun di masa Pandemi Covid 19.

Negara Indonesia tegas menjamin hak warga negaranya untuk mendapatkan informasi sesuai amanat dalam Pasal 28F UUD 1945 dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informas Publik. Hal ini berarti negara, pemerintah dan Badan Publik wajib terus menjaga kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara. Semua Badan Publik harus terus menggelorakan semangat keterbukaan dan akuntabilitas informasi yang bertujuan untuk menbangun kepercayaan dan dukungan masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana dalam kapasitasnya sebagai Ketua Penyelenggara pada acara tersebut mengatakan bahwa misi – misi permerintah salah satunya adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, madiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong serta termotivasinya Badan Publik dalam melaksanakan UU keterbukaan informasi publik.

Gede Narayana menambahkan, pada 2021 ini KIP telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 337 Badan Publik.

NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1	KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI	76,52
2	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	73,72
3	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA	72,55
4	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	71,54
5	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA	69,79

Oleh : Desi Fajar Nita, S.Sos

Terjadi penurunan dari tahun 2020 yang berjumlah 348 Badan Publik. Salah satu penyebabnya adalah penggabungan beberapa BUMN pada tahun 2020 yaitu 107 Badan Publik menjadi 101 Badan Publik pada tahun 2021. LPNK pada tahun 2020 terdapat 45 Badan Publik menjadi 41 Badan Publik pada tahun 2021 serta LNS tahun 2020 terdapat 34 menjadi 33 Badan Publik pada tahun 2021.

Pelaksanaan Monitoring dan Evauasi Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat No. 10/Kep/KIP/10/2021 tentang Hasil dan Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 secara garis besar sebagai berikut : jumlah Badan Publik 337. Badan Publik yang termasuk dalam Klasifikasi Informatif sebanyak 83, Klasifikasi Menuju Informatif sebanyak 63, Klasifikasi Cukup Informatif sebanyak 54, Klasifikasi Kurang Informatif sebanyak 37 dan Klasifikasi Tidak Infromatif sebanyak 100 Badan Publik.

Melihat dari prosentase tersebut, harus di garis bawahi bahwa keterbukaan informasi di Indonesia mengalami perubahan ke arah perbaikan pada pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik sebagaimana tujuan yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal Wantannas RI hadir menyaksikan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang diwakilkan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Humas Letkol Arh. Abdul Cholik, SH, MH.terdapat 45 Badan Publik menjadi 41 Badan Publik pada tahun 2021 serta LNS tahun 2020 terdapat 34 menjadi 33 Badan Publik pada tahun 2021.

Hasil dan Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 secara garis besar sebagai berikut : jumlah Badan Publik 337. Badan Publik yang termasuk dalam Klasifikasi Informatif sebanyak 83, Klasifikasi Menuju Informatif sebanyak 63, Klasifikasi Cukup Informatif sebanyak 54, Klasifikasi Kurang Informatif sebanyak 37 dan Klasifikasi Tidak Infromatif sebanyak 100 Badan Publik.

Melihat dari prosentase tersebut, harus di garisbawahi bahwa keterbukaan informasi di Indonesia mengalami perubahan ke arah perbaikan pada pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik sebagaimana tujuan yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

GERAKAN VAKSINASI NASIONAL DI JAWA BARAT

Oleh : Natalina Pakpahan, S.I.Kom.

Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Wantannas RI) menganggap masalah pandemi Covid-19 merupakan salah satu hal yang mengancam stabilitas nasional sehingga perlu segera diselesaikan bersama-sama. Untuk itu, Wantannas RI menginisiasi Gerakan Vaksinasi Wantannas RI yang dipusatkan di Sentra Vaksinasi area Masjid Al Jabbar Kota Bandung yang berlangsung pada, Senin 23 hingga 28 Agustus 2021 lalu.

Gerakan vaksinasi oleh Wantannas RI bekerja sama dengan berbagai pihak di Jawa Barat merupakan salah satu upaya agar Indonesia dapat segera keluar dari pandemi Covid-19. Sekretaris Jenderal Wantannas Laksdya TNI Harjo Susmoro mengatakan, dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jabar membutuhkan lebih banyak pasokan vaksin COVID-19.

“Ini perlu kita dorong agar *herd immunity* bisa lebih cepat dalam tanda kutip secara proporsional. Sehingga *herd immunity* bisa terjadi serempak, seimbang di seluruh Indonesia, Harapan kami, vaksinasi segera selesai, *herd immunity* segera tercipta, ekonomi kembali normal, sehingga semua akan kembali normal, pembangunan juga kembali berjalan," ujarnya. Di lokasi tersebut ditargetkan 10.000 orang bisa tervaksin selama kegiatan berlangsung. Sementara secara keseluruhan Wantannas menargetkan vaksinasi sebanyak 650.000 orang di Jawa Barat.

Menurutnya, vaksinasi merupakan salah satu strategi penting untuk menanggulangi pandemi untuk itu pelaksanaannya harus dipercepat dengan bergotong-royong dan kolaborasi. Pandemi COVID-19 merupakan ancaman bagi stabilitas keamanan nasional. Oleh karena itu, percepatan vaksinasi menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

"Kami membantu akselerasi vaksinasi nasional yang diselenggarakan pemerintah dengan target selesai bulan Desember 2021," kata Sesjen Wantannas.

PRESIDEN JOKOWI APRESIASI GEBYAR VAKSINASI WANTANNAS RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui panggilan *virtual* mengapresiasi penyelenggaraan Gebyar Gerakan Vaksinasi COVID-19 yang digelar serentak di Provinsi Jawa Barat oleh Wantannas RI yang

Foto : Natalina Pakpahan

bekerjasama dengan Pemda Jabar.

"Saya menyambut baik kegiatan vaksinasi massal yang dilaksanakan Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang dilaksanakan secara serempak dan terpadu di 2.326 tempat vaksinasi tersebar di berbagai tempat di Provinsi Jawa Barat," tutur Jokowi yang hadir secara virtual dalam Gebyar Gerakan Vaksinasi COVID-19 di Pelataran Masjid Al Jabbar, Kota Bandung, Sabtu (28/8/2021).

Jokowi menilai, upaya percepatan vaksinasi di Provinsi Jabar penting. Pasalnya, sebagai penyangga Ibu Kota, Jabar merupakan provinsi yang rentan terhadap risiko COVID-19. Selain mobilitas masyarakatnya yang tinggi, kata Jokowi, beberapa daerah di Jabar juga merupakan zona merah COVID-19 dan pencapaian vaksinasi di Jabar masih rendah.

"Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang penting dalam upaya penanganan pandemi, merupakan daerah penyangga Ibu Kota, rentan risiko karena mobilitas masyarakat yang padat, beberapa daerah merupakan zona merah, dan pencapaian vaksinasi nya juga masih rendah," tuturnya. Oleh karenanya, lanjut Jokowi, semua pihak harus bergerak cepat melaksanakan vaksinasi. Pasalnya, program vaksinasi yang dilaksanakan saat ini berpacu dengan penyebaran COVID-19.

"Kita menghadapi tantangan yang luar biasa dalam dua bulan terakhir dengan munculnya varian baru yaitu varian Delta. Untuk menghadapi itu, vaksinasi harus dipercepat dengan terus disiplin protokol kesehatan," tegasnya.

Upaya percepatan vaksinasi menurutnya membutuhkan kerja sama dan kontribusi yang baik dari semua, sehingga kekebalan kelompok atau *herd immunity* dapat segera tercapai dan masyarakat bisa segera kembali beraktivitas dengan aman.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil yang juga hadir secara virtual menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Wantannas RI atas inisiasinya mengakselerasi vaksinasi di Jabar, termasuk kepada semua pihak yang telah bekerja sama demi susksesnya program vaksinasi di Jabar.

selanjutnya...

Foto : Natalina Pakpahan

WAKIL PRESIDEN KUNJUNGI SENTRA VAKSINASI MESJID AL-JABAR

Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin mengapresiasi peran dan kontribusi nyata Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat serta para mitra pendukungnya dalam upaya mempercepat program vaksinasi COVID-19 melalui "Gerakan Vaksinasi Dosis Kedua Dewan Ketahanan Nasional".

"Hal ini sangat penting, mengingat vaksinasi sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan untuk mewujudkan kekebalan komunal (herd immunity)," ucap Wapres saat meninjau Sentra Vaksinasi Wantannas, di Masjid Al-Jabbar Bandung, Rabu (29/09/2021) pagi..

Wapres menyambut baik kolaborasi yang telah dibangun tersebut, terutama dukungan para mitra sehingga sentra vaksinasi yang digelar hari ini dapat terlaksana dengan baik. "Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah bersedia mengalokasikan waktu dan tempat untuk penyelenggaraan sentra vaksinasi ini, sebagai salah satu upaya percepatan vaksinasi COVID-19, khususnya bagi para pekerja di tempat industri dan konstruksi, yang semoga bisa menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Wapres berharap pelaksanaan vaksinasi ini dapat memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja di tempat industri dan konstruksi serta masyarakat sekitarnya dari penyebaran COVID-19. Meski tren kasus sudah menurun, Wapres tetap mengingatkan bahwa ancaman COVID-19 sampai saat ini belum berakhir. Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan dengan terus disiplin melaksanakan protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi.

"Saya minta peran aktif semua pihak untuk bersama-sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat, serta menjadi role model perubahan perilaku hidup sehat di masyarakat," pesannya.

Sebagai informasi, Sentra Vaksinasi Wantannas yang digelar di Area Masjid Al-Jabbar Bandung, sasarannya mencapai 10.409 orang, yakni para pekerja industri, pekerja konstruksi Masjid Al-Jabbar, pelajar (usia 12-17 tahun) beserta keluarga, serta masyarakat sekitar, dengan target harian sekitar 1.300 orang. Penyuntikan vaksin dosis pertama telah dilaksanakan pada 23-29 Agustus 2021, sedangkan penyuntikan dosis kedua dilaksanakan pada 23-29 September 2021.

Koordinator tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dr. Dewi Ambarwati, MKM, menargetkan vaksinasi sekitar 1.200 hingga 1.300 per hari pada kegiatan vaksinasi yang pelaksanaannya diketuai oleh Staf Ahli Pertahanan dan Keamanan Wantannas RI Laksda TNI Denih Hendrata, S.E., M.M, CHRMP. Jumlah tenaga kesehatan yang mendukung kegiatan vaksinasi tersebut berjumlah sekitar 60 orang, di luar petugas pencatatan dan pelaporan. Mereka merupakan para relawan dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, Puskesmas Cempaka Arum, RS Al-Ihsan Jawa Barat, RS Edelweis, relawan TBG (Tower Bersama Grup), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan juga dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Sementara untuk vaksinnya sendiri disediakan dari alokasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan distribusi di lapangan dibantu oleh pihak logistik (Koslog) dan ikatan apoteker Jawa Barat.

Gerakan Vaksinasi Wantannas terselenggara atas dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Forkopimda, dan *stakeholder* lain seperti BUMN Adhi HK KSO, Perum Bulog, Kimia Farma, PT Pindad, Telkom Indonesia, Biofarma, LEN, dan BPJS Ketenagakerjaan.***

WANTANNAS RAIH OPINI WTP KATEGORI 10KALI BERTURUT-TURUT

Kementerian Keuangan mengadakan kegiatan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 pada Selasa, 14 September 2021. Dalam sambutannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah pusat maupun daerah akan terus menjaga akuntabilitas keuangan negara dalam rangka penanganan pandemik COVID-19 dengan melibatkan para penegak hukum.

"Pemerintah bekerja keras menggunakan instrument APBN untuk meringankan dan memulihkan ekeonomi. Kita menggunakan *resources* ini harus dipertanggung-jawabkan," kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah tahun 2021 di Jakarta, Selasa (14/9/2021).

Dalam kesempatan yang sama, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 ke 84 Laporan Keuangan K/L atau 97.7 persen atau satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) beropini WTP.

Dewan Ketahanan Nasional merupakan salah satu Lembaga Non Struktural yang mendapat opini WTP kategori WTP 10 kali berturut-turut. Untuk diketahui, Wantannas RI kembali meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020. Peraihan Opini WTP Tahun Anggaran 2020 ini mencapai yang ke-14 kali, secara berturut-turut diraih Setjen Wantannas sejak tahun 2007 lalu.

Sri Mulyani menyebutkan Lembaga penegak hukum yang bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara ini meliputi Polri, Kejaksaan Agung, KPK, BPK RI, BPKP dan LKPP. Ia menegaskan pelibatan Lembaga-lembaga penegak hukum dilakukan dalam rangka menghindari potensi terjadinya risiko penyelewengan terhadap uang negara yang pada akhirnya mengurangi efektivitas program.

Ia tak memungkiri bahwa mengatur keuangan negara di tengah krisis sangat tidak mudah mengingat banyak Kementerian/Lembaga (K/L) yang secara tiba-tiba harus refocusing terhadap anggarannya. Terlebih lagi, beberapa K/L juga mendadak mendapat anggaran sangat besar karena harus menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemik seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kemenko UKM, dan BNPB. Meski demikian, Sri Mulyani menyatakan K/L dan pemerintah daerah telah mampu melewati tantangan dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara pada tahun lalu.

Apakah bingung dengan beasiswa yang dapat Anda ajukan? Tahukah Anda, banyak sekali manfaat dan keuntungan mendapatkan beasiswa. Namun, sebelum mendaftar, sebaiknya pahami dulu bahwa ada beberapa jenis beasiswa. Memahami berbagai beasiswa universitas akan membantu Anda memilih beasiswa yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Anda.

Kali ini kita akan membahas tentang beasiswa yang sumber pendanaannya dari Pemerintah. Beasiswa ini ditawarkan oleh pihak pemerintah, misalnya dari kementerian atau lembaga lainnya. Berbagai departemen dan lembaga pemerintahan menyediakan berbagai beasiswa yang tidak hanya dapat diikuti oleh karyawannya saja, tetapi juga terbuka untuk umum. Salah satunya adalah beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Dilansir dari laman resminya, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mengarahkan segenap usahanya guna mencetak pemimpin masa depan yang tersebar di berbagai bidang. Pengelolaan dana abadi pendidikan ini bertujuan menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi mendatang sebagai pertanggungjawaban antargenerasi.

LPDP berfokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia di berbagai bidang yang menunjang percepatan pembangunan Indonesia. Beberapa di antara prioritas yang menjadi fokus LPDP antara lain; teknik, sains, pertanian, hukum, ekonomi, keuangan, kedokteran, agama, serta sosial-budaya.

LPDP berkomitmen untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan serta mendorong inovasi demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. LPDP menyelenggarakan program beasiswa magister/doktoral untuk putra-putri terbaik Indonesia, pendanaan riset komersial/implementatif untuk mendorong inovasi, serta rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam.

JENIS BEASISWA LPDP

Beasiswa LPDP yang diberikan kepada calon penerimanya terdiri dari beberapa jenis yaitu:

1. Beasiswa Magister dan Doktor
   Beasiswa Magister dan Doktor merupakan beasiswa yang diberikan untuk membiayai pendidikan jenjang Magister dan Doktor di Perguruan Tinggi Dalam Negeri ataupun Perguruan Tinggi Luar Negeri.
2. Beasiswa Tesis dan Disertasi
   Beasiswa Tesis dan Disertasi merupakan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya berupa Tesis (S2) atau Disertasi (S3) di suatu Perguruan Tinggi baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri yang mengalami kendala masalah biaya.
3. Beasiswa Afirmasi
   Beasiswa Afirmasi merupakan beasiswa

Oleh : Fauziah Nurunnajmi, S.E.

yang diberikan kepada putra putri Indonesia yang telah berjasa mengharumkan nama bangsa dalam berbagai kompetisi ditingkat Internasional tetapi tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister atau Doktor karena masalah ekonomi. Maka mahasiswa yang demikian itu mendapatkan kesempatan mendapatkan Beasiswa Afirmasi. Beasiswa Afirmasi juga diberikan untuk kelompok masyarakat berprestasi yang berasal dari keluarga miskin termasuk juga lulusan penerima Bidikmisi.

4. Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis
   Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis diberikan kepada Dokter Spresialis untuk membiayai pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Perguruan Tinggi Dalam Negeri. Sasaran bidang ilmu Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis, sesuai prioritasnya adalah sebagai berikut: Spesialis Obstetri & Ginekologi, Spesialis Anak, Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Anastesiologi, Spesialis Bedah, Spesialis Radiologi, Patologi Klinik, Rehabilitasi Medik, dan dimungkinkan program spesialis lain yang ada dalam daftar LPDP.
5. Indonesia *Presidential Scholarship*
   Indonesia *Presidential Scholarship* merupakan program pemberian beasiswa untuk putra putri terbaik Indonesai agar dapat menempuh Pendidikan jenjang Magister atau Doktor di Perguruan Tinggi terbaik di Dunia. Beasiswa Indonesia *Presidential Scholarship* ini diberikan agar nantinya putra putri Indonesia yang telah menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi terbaik tersebut dapat membantu mengisi dan menyiapkan Indonesia menjadi negara yang maju pada 100 tahun kemerdekaan RI pada tahun 2045.

LPDP kembali memberikan kesempatan bagi anak bangsa yang ingin meraih beasiswa pendidikan di tahun ajaran 2022/2023. Yakni di sekitar Januari-Februari 2022 untuk perkuliahan di bulan Agustus 2022. Adapun beasiswa pendidikan LPDP di tahun 2022 mulai dari beasiswa untuk S2 maupun S3 di dalam dan luar negeri. Beasiswa S1 khusus pendidik vokasi hingga beasiswa S2 maupun S3 khusus guru dan tenaga kependidikan di dalam dan luar negeri.

Pengadaan beasiswa ini tentunya bukan tanpa tujuan, melainkan untuk mendukung sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Selain itu, lulusan penerima beasiswa juga harus memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan memiliki visi untuk menjadi masa depan negara dan pemimpin Indonesia. Tentunya kualitas pendidikan yang diberikan melalui beasiswa ini memiliki standar yang cukup tinggi. Namun, dengan adanya beasiswa ini juga diharapkan agar akses terhadap pendidikan tinggi semakin terbuka bagi masyarakat Indonesia.

Perlukah memakai *smartwatch?*

Oleh : Jordan Hendrix Setiawan, A.Md

Jaman sekarang ini tentunya sudah tidak asing lagi dengan *smartwatch* atau jam tangan pintar. Teknologi jam tangan pintar ini mulai digemari masyarakat khususnya kaum milenial. Nah sebelum kita memikirkan perlu atau engganya *smartwatch*, kita simak sejarah munculnya jam pintar ini.

Salah satu raksasa teknologi, Intel adalah pelopor munculnya *smartwatch* di era 1970an. Intel menjadi salah satu perusahaan yang menghadirkan Smartwatch dengan membeli sebuah perusahaan jam bernama Microma Universal. Kemudian pada tahun 1982, salah satu brand jam tangan ternama dunia, Seiko juga mulai sepak terjangnya di dunia smartwatch. Dan ditahun 1999 hingga tahun 2000 ada tiga perusahaan besar yang ikut mengembangkan *smarwatch*, yakni PDA dan Fossil kemudian juga ada IBM dan Citizen. Kemudian di tahun 2013 era *smarwatch* baru telah dimulai. Diawali dengan Samsung, Sony dan Pebble yang ikut membuat smartwatch dengan sistem dan fitur yang lebih terbaru. Pada tahun 2014 akhirnya Apple juga mengikuti jejak para pesaingnya dengan merilis jam tangan pintarnya.

Kelebihan dan kekurangan *smartwatch*

Kelebihan

1. Desain yang ringan dan nyaman

   Smartwatch ini hadir sebagai aksesoris pendukung dengan fungsi yang memudahkan untuk memantau Kesehatan hingga notifikasi dari handphone yang dibuat ringan, nyaman dan tentunya desain yang menarik namun tidak melupakan esensi sesungguhnya sebagai penunjuk waktu.
2. Fitur

   Selain sebagai penunjuk waktu, *smartwatch* juga biasa digunakan untuk memantau Kesehatan, mulai dari detak jantung, tingkat setres hingga kandungan oksigen dalam darah. Fitur lainnya yang dimiliki seperti bisa digunakan untuk melihat notifikasi dari *handphone,* sebagai remote kamera dan masih banyak lagi fitur yang ada di dalamnya.
3. Fitness Tracker

   Di dalam fitur *smartwatch* salah satunya terdapat *fitness tracker* yang dapat memantau data Ketika anda sedang berolahraga, mulai dari kalori yang di bakar hingga rute dan jarak yang telah ditempuh selama olahraga.

Kekurangan

1. Harga yang relatif mahal

   Tidak dipungkiri, jam tangan pintar ini memiliki berbagai fitur yang modern dan canggih namun untuk menebus fasilitas tersebut diperlukan merogeh kocek yang cukup. Tak tanggung-tanggung ada yang harganya menginjak puluhan juta
2. Baterry

   Smartwatch ditenagai dengan baterai yang mengharuskan untuk melakukan pengisian ulang. Hal tersebut kadang menghilangkan kesederhanaan dari sebuah jam tangan yang bisa selalu siap jika ingin dipakai tanpa harus mempermasalahkan pengisian daya. Memang untuk sekarang ini, smartwatch ada yang sudah memiliki daya tahan baterai yang di klaim bisa mencapai 2 minggu. Mungkin bagi sebagian orang hal tersebut sudah cukup memecahkan masalah pengisian daya, namun ada juga yang tidak mau beralih menggunakan smartwatch karena masalah pengisian daya.
3. Bahan material

   Bahan material yang digunakan untuk pembuatan jam tangan pintar ini cukup membuat khawatir, karena kebanyakan masih menggunakan body plastik yang kurang sekali perlindungannya. Bisa saja sekali terjatuh, jam akan rusak atau pecah. Namun ada juga jam tangan pintar yang menggunakan bahan material yang kokoh, tapi ada konsekuensinya yaitu harga yang cukup mahal.

Nah itulah beberapa pertimbangan dari kelebihan dan kekurangan *smartwatch.* Dengan segudang fitur yang luar biasa, *smartwatch* menjadi gadget idola setelah *smartphone.* Namun butuh atau tidaknya *smartwatch,* tergantung kebutuhan dan fungsinya.

RICA-RICA IKAN TONGKOL

Oleh : Susi Hendrawati

Bahan :
- 1 Ekor ikan tongkol (Bersihkan dikerat-kerat, dilumuri jeruk nipis, lada, garam dan bawang putih)
- 1 Buah Tomat (iris selera)
- Daun bawang secukupnya
- 1 Lembar daun kunyit
- Kemangi (sesuai selera)
- 1 Batang sere (iris)

Bumbu Yang Dihaluskan
(Rebus terlebih dahulu agar tidak lekas basi)
- 5 Lembar daun jeruk (iris halus)
- 8 Siung bawang merah
- 8 Siung bawang putih
- 5 Butir kemiri
- 1 Ruas jahe
- 1 Ruas kunyit
- 10 Cabe rawit merah
- 10 Cabe keriting
- 1 Sdt gula pasir

Cara Membuatnya:
1. Bersihkan ikan tongkol, lalu lumuri dengan lada, bawang putih, garam, jeruk nipis), diamkan kurang lebih 1 jam, agar bumbu meresap
2. Setelah itu kukus ikan tongkol kurang lebih 20 menit, setelah itu ikan tongkol dipanggang dengan api sedang, setelah dipanggang taruh diwadah (piring/pirek)
3. Rebus semua bumbu, lalu tiriskan kemudian diulek sampai halus
4. Setelah itu tumis semua bumbu sampai harum dan matang, masukan daun bawang, sere, daun jeruk, beri gula pasir dan penyedap rasa secukupnya, sebelum diangkat masukan kemangi
5. Matikan kompor angkat bumbu yang sudah ditumis tadi, lalu siramkan diatas ikan yang sudah disiapkan diatas piring/pirek)
6. Taburi dengan tomat iris, kemangi dan cabe merah utuh yang masih segar
7. Sajikan dengan nasi hangat. selamat mencoba

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 tentang DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Oleh : Fauziah Nurunnajmi, S.E.

Presiden RI Joko Widodo menerbitkan regulasi terbaru mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketentuan disiplin PNS menjadi salah satu unsur manajemen kepegawaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dituangkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021.

Sebelum PP 94/2021 yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 86 ayat (4) UU ASN diterbitkan, ketentuan disiplin PNS merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dengan terbitnya PP 94/2021 maka ada sejumlah perubahan ketentuan disiplin PNS yang sebelumnya diatur dalam PP 53/2010.

Kebijakan ini menegaskan bahwa PNS diharuskan menaati kewajiban serta tidak melakukan larangan sebagaimana tercantum dalam peraturan ini. Adapun kewajiban bagi PNS tersebut disebutkan dalam Pasal 3 sebanyak delapan kewajiban dan sembilan kewajiban yang terdapat pada Pasal 4. Sedangkan, terdapat 14 larangan yang harus dihindari oleh PNS sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.

"PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin," bunyi Pasal 7 peraturan yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2021.

Tingkat hukuman disiplin terbagi menjadi tiga, yakni hukuman disiplin ringan, sedang, hingga berat. Untuk jenis hukuman disiplin, terbagi berdasarkan tingkatan.

Bagi hukuman disiplin ringan, jenis hukumannya terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis, serta pernyataan tidak puas secara tertulis. Untuk tingkat hukuman disiplin sedang, hukuman yang diberikan adalah pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen yang terbagi menjadi tiga kurun waktu, yakni selama 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan.

Hukuman disiplin berat juga terbagi tiga. Pertama, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Kedua, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Ketiga, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Dilansir dari bkn.go.id, sejumlah perubahan ketentuan disiplin PNS dari PP 53/2010 menjadi PP 94/2021 di antaranya:

1. Adanya pengertian mengenai Masuk Kerja, yakni keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.

2. Penambahan ketentuan larangan PNS berupa melakukan pungutan di luar ketentuan. Lebih lanjut "pungutan di luar ketentuan" adalah pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan atau penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan uang, barang, atau bentuk lain untuk kepentingan pribadi atau atau pihak lain baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
3. Tidak lagi mengatur ketentuan pidana sehingga bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan ada unsur pidananya, maka ditangani sesuai ketentuan perundang-undangan pidana terhadap PNS yang bersangkutan.
4. Adanya perubahan jenis hukuman disiplin sedang dan jenis hukuman disiplin berat.
5. Perubahan mengenai pelanggaran atas kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, yaitu:

Kategori Pelanggaran Kewajiban Masuk Kerja	Hukuman Disiplin Ringan
3 Hari Kerja	Teguran Lisan
4 s.d 6 Hari Kerja	Teguran Tertulis
7 s.d 10 Hari Kerja	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

Kategori Pelanggaran Kewajiban Masuk Kerja	Hukuman Disiplin Sedang
11 s.d 13 Hari Kerja	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 6 bulan
14 s.d 16 Hari Kerja	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 9 bulan
17 s.d 20 Hari Kerja	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 12 bulan

Kategori Pelanggaran Kewajiban Masuk Kerja	Hukuman Disiplin Berat
21 s.d 24 Hari Kerja	Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah selama 12 bulan
28 Hari Kerja atau Lebih	Pemberhentian dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
10 Hari Kerja terus menerus	Pemberhentian dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri sebagai PNS

6. Penyederhanaan pembagian kewenangan pejabat yang berwenang menghukum.
7. Pembentukan Tim Pemeriksa bersifat pilihan untuk dugaan pelanggaran hukuman disiplin (HD) tingkat sedang dan bersifat wajib untuk dugaan pelanggaran disiplin tingkat berat. Sebelumnya dalam PP 53/2010 ditentukan bahwa untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang atau berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa (bersifat pilihan).
8. Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin (HD) dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
9. Dalam hal Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan HD kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, tidak menjatuhkan HD yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat. Sebelumnya dalam PP 53/2010 hanya dijatuhi HD yang sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
9. PNS yang melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian PNS dijatuhi salah satu jenis HD berat sesuai dengan ketentuan dalam PP 94/2021.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban PNS Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja akan diatur dalam Peraturan Menteri PANRB.
11. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara.
12. Peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan mengenai Disiplin PNS yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

HARI ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Oleh : Fauziah Nurunnajmi, S.E.

Tanggal 25 November, merupakan salah satu tanggal penting bagi kaum perempuan di seluruh dunia. Pasalnya, tanggal tersebut merupakan peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP). Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sendiri baru secara resmi menetapkan 25 November sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada 17 Desember 1999.

Peringatannya berupa Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 *Days of Activism Against Gender Violence*), yaitu kampanye internasional yang berisi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Tujuan dari hari tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran akan fakta bahwa wanita di seluruh dunia menjadi korban pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk kekerasan lainnya.

Kampanye 16 Hari Anti Perempuan dicetuskan oleh *Women's Global Leadership Institute* pada tahun 1991 yang disponsori oleh *Center for Women's Global Leadership*.

Berlangsung dari tanggal 25 November hingga 10 Desember, menjadi dasar penyebutan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Nasional. Pemilihan rentang waktu tersebut secara simbolik berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan HAM, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Selama enam belas hari, peringatan yang bertemakan hak-hak asasi yang berlangsung yaitu 25 November sebagai Hari Anti Kekerasan Perempuan Internasional, 1 Desember sebagai Hari AIDS Sedunia, 2 Desember sebagai Hari Penghapusan Perbudakan Internasional, 3 Desember sebagai Hari Penyandang Cacat Internasional, 5 Desember sebagai Hari Sukarelawan Internasional, 6 Desember sebagai Hari Tidak Ada Toleransi bagi Kekerasan terhadap Perempuan, dan puncaknya 10 Desember sebagai Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.

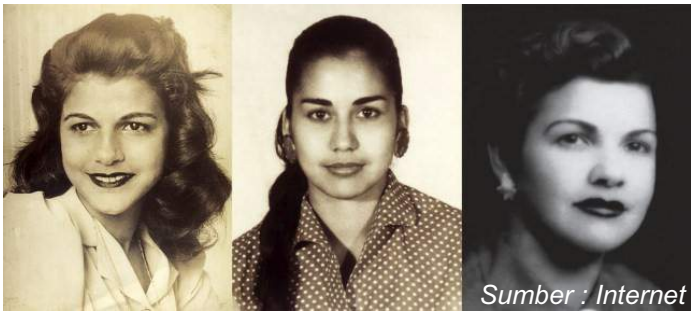
Sumber : Internet

Seperti apa sejarahnya?

Melansir dari *HISTORY*, tanggal 25 November bertepatan dengan hari terbunuhnya Mirabal bersaudara, yakni Patria, Minerva, dan Maria Teresa pada tahun 1960.

Mereka adalah aktivis yang berani menentang kediktatoran penguasa Republik Dominika saat itu, yaitu Rafael Trujilo. Malangnya, mereka dibunuh oleh kaki tangan Trujilo karena dianggap merecoki kekuasaannya.

Tanggal 25 November kemudian dideklarasikan sebagai Hari Anti Kekerasan

Ilustrasi : Radar Malang

Terhadap Perempuan pada 1981 saat Kongres Perempuan Amerika Latin yang pertama. Sejak saat itu, negara-negara Amerika Latin merayakan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan setiap 25 November. Negara-negara anggota PBB belum secara resmi mengakuinya sampai tahun 1999.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia sendiri telah memiliki payung yang melindungi perempuan dengan adanya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Komnas Perempuan memprakarsai dan memfasilitas penggalakkan Kampanye 16 HAKTP ini sejak tahun 2003. Kampanye ini berlangsung di wilayah-wilayah yang menjadi mitra Komnas Perempuan.

Pada tahun 2020, Komnas Perempuan juga mengadakan ajakan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Kampanye 16 HAKTP. Hal tersebut perlu digalakkan karena kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Dilansir dari laman komnasperempuan.go.id, beragam spektrum dan bentuk kekerasan yang beragam terekam dalam CATAHU 2020, dan temuan khusus yang didapatkan diantaranya:

1. Dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat;
2. Terdapat Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP) melonjak sebanyak 2.341 kasus, tahun sebelumnya sebanyak 1.417. Kenaikan dari tahun sebelumnya terjadi sebanyak 65% dan paling banyak adalah kasus inses dan ditambahkan dengan kasus kekerasan seksual (571 kasus);
3. Dalam data pengaduan yang langsung ke Komnas Perempuan, tercatat kenaikan yang cukup signifikan yakni pengaduan kasus *cybercrime* 281 kasus (2018 tercatat 97 kasus) atau naik sebanyak 300%. Kasus siber terbanyak berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban;
4. Kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas dibandingkan tahun lalu naik sebanyak 47% dan korban terbanyak adalah disabilitas intelektual.

Dikutip dari laman resmi Komnas Perempuan, 16 hari memberikan waktu yang cukup guna membangun strategi pengorganisiran agenda bersama. Pasalnya, penghapusan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan kerja sama dan sinergi dari berbagai komponen masyarakat, baik aktivis HAM perempuan, pemerintah, maupun masyarakat secara umum.

GALERY

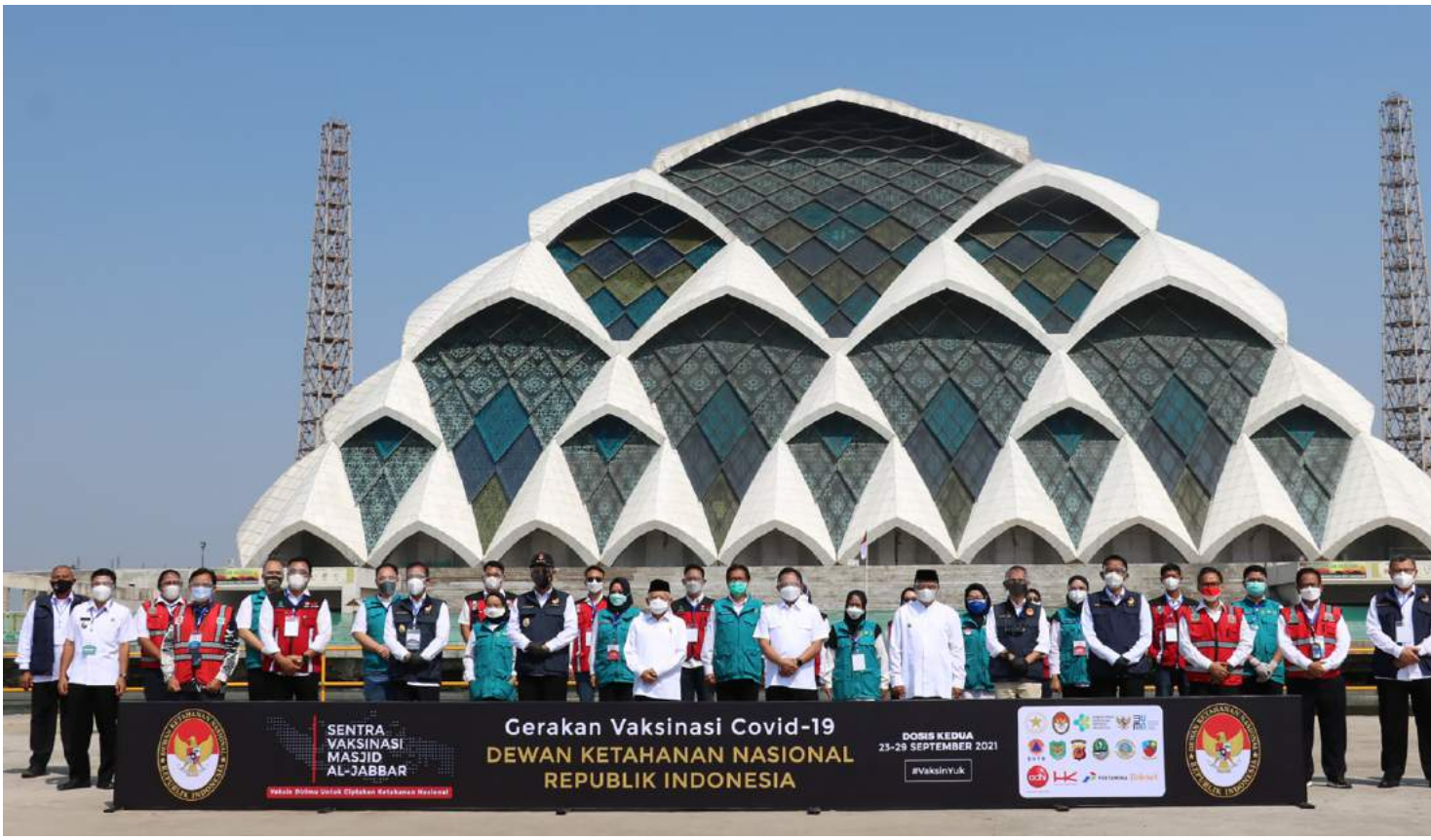
SENTRA
VAKSINASI
MASJID
AL-JABBAR
Gerakan Vaksinasi Covid-19
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
DOSIS KEDUA
23-29 SEPTEMBER 2021
#VaksinYuk

WANTANNAS RI
SELAMAT DATANG
PARA PESERTA PRA SIDANG
DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI

Kampus Merdeka
KULIAH UMUM
Oleh : Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H.
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
STRATEGI KEAMANAN NASIONAL DALAM RANGKA

kimia farma
BANTUAN 1000 PAKET VITAMIN

93TH SUMPAH PEMUDA
BERSATU, BANGKIT DAN TUMBUH

SELAMAT HARI

SUMPAH PEMUDA

BERSATU, BANGKIT DAN TUMBUH

DEWAN KETAHANAN NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL
Jl. Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat 10110
Telp : +62-21-3451057, 3863984 Fax: +62-21-3441683

www.wantannas.go.id Setjen Wantannas Setjen_Wantannas Setjen Wantannas